



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK- POKOK KEBIJAKAN FISKAL (KEM PPKF) 2019

**Disampaikan pada Rapat Kerja antara
Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI**

Jakarta, 31 Mei 2018

POKOK BAHASAN



KERANGKA EKONOMI MAKRO



KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH



POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2019

1. Pelaksanaan APBN 2018
2. Arah dan Strategi Makro Fiskal 2019
 - A. Mobilisasi Pendapatan yang Realistis
 - B. Belanja yang Efektif dan Produktif
 - C. Efisiensi dan Inovasi Pembiayaan
3. Program Prioritas dan Isu Strategis



- **Perekonomian nasional 2019 diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%** seiring dengan momentum perbaikan perekonomian nasional
- **Percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan investasi disertai terkendalinya inflasi** telah mendorong penguatan fundamental perekonomian nasional sepanjang 2017-2018
- Ekonomi global menuju keseimbangan baru. Namun akan disertai volatilitas keuangan global yang ditandai dengan depresiasi mata uang secara merata di dunia dipicu oleh kondisi ekonomi AS. Risiko ketidakpastian global juga berasal dari gejala proteksionisme, ancaman perang dagang, naiknya harga minyak, serta kondisi geopolitik terutama di Timur Tengah dan Semenanjung Korea
- Pemerintah perlu **menyiapkan mitigasi** melalui kebijakan fiskal yang **mendorong investasi dan ekspor, menjaga daya beli**, melibatkan swasta dalam pendanaan **investasi dan infrastruktur**, menjaga **tata kelola dan kesehatan keuangan BUMN**, serta terus menjaga kredibilitas pelaksanaan APBN.
- Tema RKP 2019: “**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**” maka tema kebijakan fiskal 2019 adalah “**APBN untuk mendorong investasi dan daya saing**” dengan fokus:
 - **menjaga kesehatan fiskal**: produktif, efisien, daya tahan, dan *sustainable*
 - **mendorong iklim investasi dan ekspor**: (1) simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, (2) peningkatan kualitas layanan, dan (3) insentif fiskal untuk investasi dan ekspor
- **Kebijakan Fiskal 2019 ekspansif dengan defisit 1,6%-1,9% dari PDB dan keseimbangan primer menuju positif**
- **Strategi yang ditempuh adalah**: (1) mobilisasi pendapatan yang realistis, (2) strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, (3) pembiayaan kreatif dengan melibatkan peran swasta
- **Kebijakan Fiskal 2019 memperkuat komitmen pemerintah**:
 - **penguatan SDM** untuk peningkatan *skill* dan produktivitas
 - **mendorong investasi dan ekspor**
 - pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan
 - pembangunan **infrastruktur** dan kapasitas produksi
 - reformasi institusi untuk **birokrasi yang melayani dan efisien**
 - penguatan **kualitas desentralisasi fiskal**



KERANGKA EKONOMI MAKRO

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

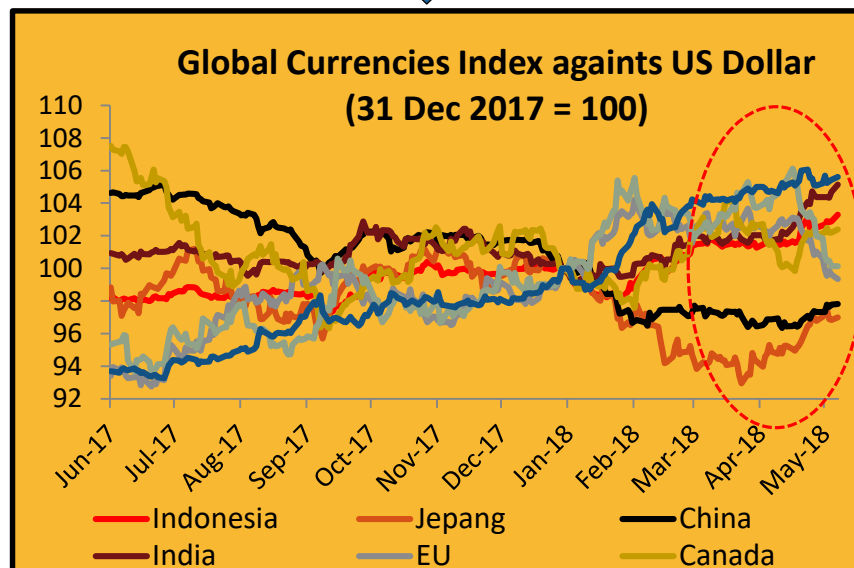
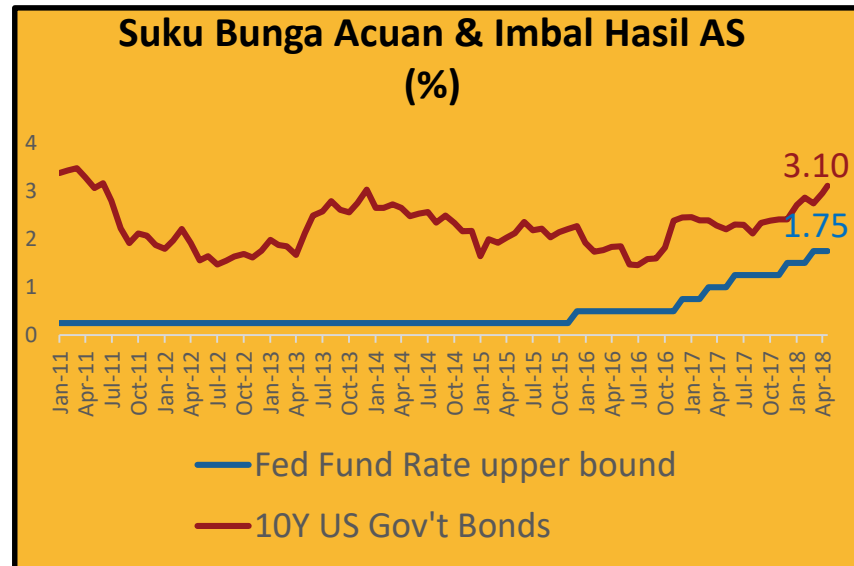
Perkembangan Tahun 2016-2018 dan Outlook 2019



Indikator	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	APBN	Perkiraan
a. Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,02	5,07	5,4	5,4 – 5,8
b. Inflasi (%, yoy)	3,02	3,61	3,5	2,5 – 4,5
c. Tingkat Suku Bunga SPN-3 bulan (%)	5,7	4,98	5,2	4,6 – 5,2
d. Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.307	13.384	13.400	13.700 – 14.000
e. Harga minyak mentah Indonesia (US\$/Barel)	40,2	51,2	48	60 – 70
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	829	803,91	800	722 – 805
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.180	1.142,33	1.200	1.210 – 1.300

PEREKONOMIAN GLOBAL MENUJU KESEIMBANGAN BARU

Stabilitas ekonomi domestik perlu dijaga untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka menengah



- Perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) mendorong berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat (kenaikan *Fed Fund Rate*/FFR).
- Kebijakan fiskal AS mendorong peningkatan defisit dan berdampak kenaikan *yield US Treasury Bill*.
- Mendorong arus modal ke AS → gejolak pasar keuangan dan nilai tukar
- **Faktor domestik AS dan tren kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong terciptanya keseimbangan baru (*a new normal*)**
- Perkembangan menuju *new normal* menimbulkan gejolak di berbagai negara dan kawasan

**Potensi pertumbuhan
5,4 – 5,8%**

- **Pembangunan infrastruktur dan peningkatan Investasi**
- **Inflasi yang terjaga**
- **Perbaikan kinerja ekspor**
- **Perbaikan persepsi investor**

- Pemerintah fokus pada stabilisasi perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah.
- Respon kebijakan untuk stabilitas perekonomian domestik
 - ✓ Koordinasi kebijakan Pemerintah, BI, OJK, LPS: **stabilitas nilai tukar Rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman**
- Kebijakan fiskal: penguatan posisi fiskal dan kesehatan APBN
 - ✓ Ruang gerak fiskal
 - ✓ Perbaikan posisi keseimbangan primer



PERKIRAAN PERTUMBUHAN PDB 2019

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih dalam upward trend. Investasi dan konsumsi tetap menjadi motor pertumbuhan

Pertumbuhan	2016	2017	2018 APBN	2019 Range
Konsumsi RT & LNPRT	5,0	5,0	5,1	5,1 - 5,2
Konsumsi Pemerintah	-0,1	2,1	3,8	2,8 - 3,7
PMTB	4,5	6,2	6,3	7,5 - 8,3
Ekspor	-1,6	9,1	5,1	6,0 - 7,2
Impor	-2,4	8,1	4,5	6,3 - 7,6
PDB	5,0	5,1	5,4	5,4 - 5,8

Perkiraan Oleh Berbagai Institusi (%)		
Institusi	2018	2019
IMF (Apr 18)	5,3	5,5
Consensus Forecast (Apr 18)	5,3	5,4
World Bank (Mar 18)	5,3	5,5
OECD (Mar 18)	5,3	5,4
ADB (Des 17)	5,3	N/A

Perbaikan Ekonomi diperkirakan berlanjut pada tahun 2019, diperkirakan sebesar 5,4-5,8%.

Konsumsi

- Konsumsi masyarakat diharapkan tumbuh di atas 5,0% didukung oleh perbaikan pendapatan, inflasi yang rendah
- Perlu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang tepat waktu dan tepat sasaran

Investasi

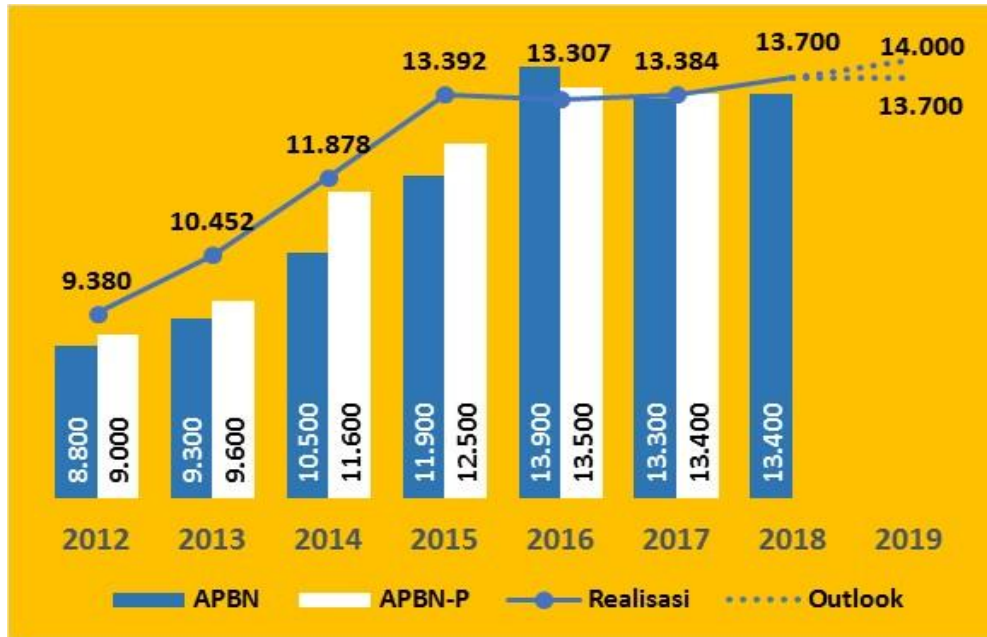
- Investasi diperkirakan terus meningkat sejalan dengan perbaikan daya saing dan persepsi investor
- Perbaikan daya saing didorong oleh program pembangunan infrastruktur strategis dan perbaikan iklim usaha serta berlanjutnya dampak paket-paket kebijakan ekonomi
- Peran swasta harus tetap didorong untuk meningkatkan kinerja investasi
- Penguatan dan pendalaman pasar keuangan, seperti pengayaan alternatif-alternatif sumber dan model pendanaan investasi
- Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam mendorong perekonomian baik dalam jangka pendek maupun panjang

Ekspor - Impor

- Perkiraan pertumbuhan ekonomi global masih meningkat disertai membaiknya perekonomian negara mitra dagang utama, namun perlu diwaspadai gejala proteksionisme di beberapa negara.

NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS

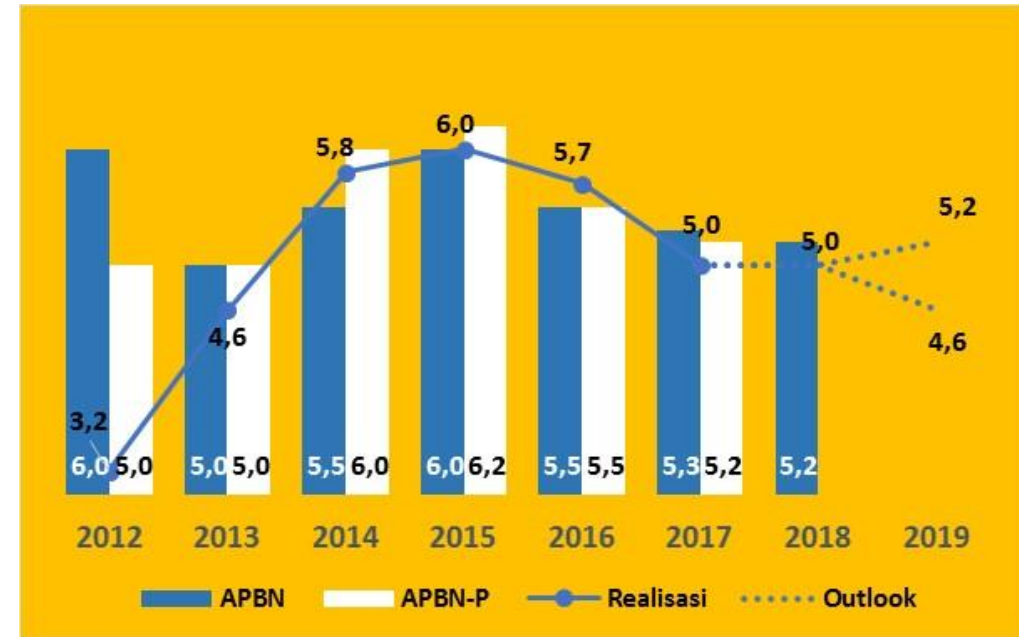
Risiko global mendorong pergerakan Rupiah pada kisaran Rp13.700-14.000/US\$



- Di 2018 nilai tukar diperkirakan akan mengalami depresiasi akibat dampak perbaikan ekonomi AS, normalisasi kebijakan moneter AS, pelaksanaan kebijakan perdagangan proteksionis, reformasi perpajakan dan kebijakan fiskal ekspansif AS serta kekhawatiran permasalahan geopolitik
- Potensi *net capital inflow* didukung masih berlangsungnya *quantitative easing* dan masih rendahnya suku bunga di Eropa dan Jepang
- Kebijakan stabilitas nilai Rupiah secara terukur sesuai dengan fundamental ekonomi oleh Bank Indonesia didukung cadangan devisa yang kuat dan peningkatan peringkat utang serta EODB
- Penguatan koordinasi kebijakan terus berlangsung dalam rangka memperbaiki stabilitas makroekonomi, termasuk koordinasi penyediaan pasokan dan kebutuhan valas di antara BUMN

TINGKAT SUKU BUNGA SPN 3 BULAN

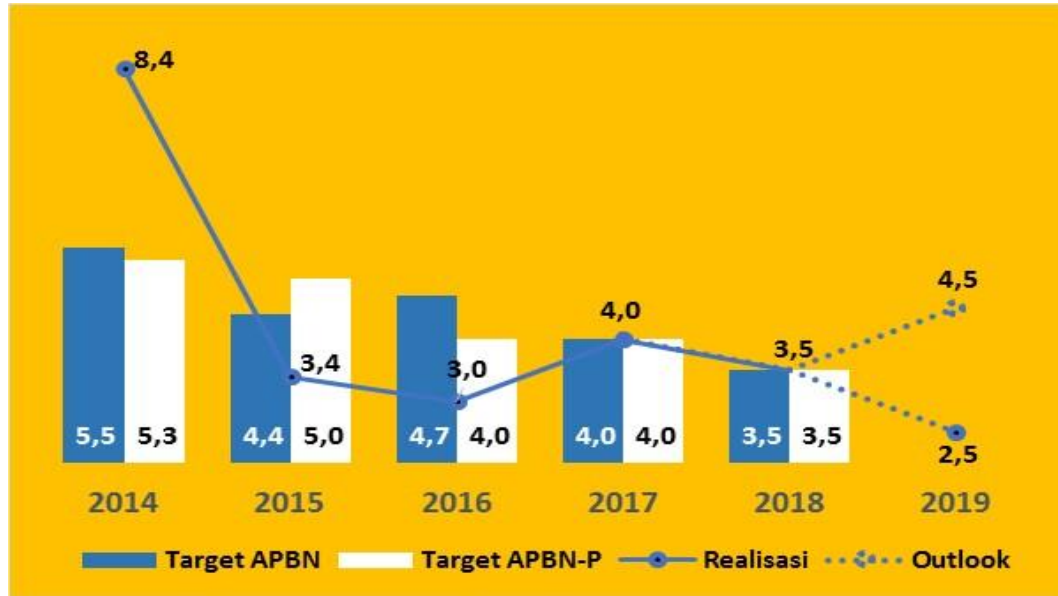
Kredibilitas fiskal meningkatkan kepercayaan investor, suku bunga terjaga 4,6-5,2%



- Di 2018, terdapat risiko tekanan suku bunga SPN dari sentimen perang dagang antara AS dan Tiongkok serta kebijakan moneter AS yang berpotensi menaikkan suku bunga acuan AS sebanyak 4 kali selama 2018, menyebabkan peningkatan tingkat suku bunga obligasi pemerintah AS
- Yield SPN 3 bulan saat ini masih cukup rendah, namun ada kecenderungan meningkat. Pengelolaan suku bunga obligasi akan tetap dilakukan dengan memperhatikan secara seksama pergerakan pasar global dan domestik Indonesia.
- Peningkatan daya serap pemodal domestik didukung oleh masih tingginya tingkat likuiditas di perbankan serta penilaian positif atas kebijakan *front loading* dan penerbitan SPN tenor pendek

PERKIRAAN LAJU INFLASI

Laju inflasi diperkirakan relatif terjaga pada kisaran 2,5-4,5 persen



- Sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan $3,5 \pm 1\%$, dan terus menurun dalam jangka menengah sehingga dapat mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat
- Pencapaian target inflasi perlu ditopang oleh terkendalinya laju inflasi inti
- Inflasi *volatile food* perlu dikendalikan dengan kebijakan tata niaga pangan, penguatan pemantauan distribusi, dan peningkatan produktivitas pertanian. Pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi sistem distribusi
- Pengelolaan risiko kebijakan *administered price*, terutama kebijakan harga energi yang fleksibel dan tepat dapat mengendalikan tingkat inflasi umum
- Namun, terdapat risiko tekanan yang berasal dari depresiasi rupiah sebagai dampak ketidakpastian perekonomian global serta potensi peningkatan harga minyak mentah global

PERKIRAAN HARGA MINYAK MENTAH (ICP)

ICP US\$60-70 per barel untuk memberi fleksibilitas dalam penyusunan pagu



PROYEKSI HARGA MINYAK BRENT (US\$/BAREL)		
No.	FIRM	2019
1	BMI Research	77,0
2	Intesa Sanpaolo SpA	75,0
3	Raiffeisen Bank International AG	71,0
4	Citigroup Inc	70,0
5	Toronto-Dominion Bank/Toronto	68,0
6	BNP Paribas SA	66,0
7	Santander UK PLC	65,0
8	Societe Generale SA	65,0
9	Commerzbank AG	61,0
10	Capital Economics Ltd	60,0
Rata-Rata		67,8

Sumber: Bloomberg, diolah

PROYEKSI HARGA MINYAK ICP (US\$/BAREL)				
	2016	2017	2018	2019
			APBN	Range*
ICP	40,2	51,2	48	60 70

- ICP bergerak seiring dengan perkembangan harga minyak mentah acuan dunia, terutama Brent
- Faktor pendorong kenaikan harga adalah ketegangan geopolitik di beberapa negara penghasil minyak, sentimen pemangkasan produksi OPEC di tahun 2018, dan sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela.
- Faktor penghambat kenaikan harga, a.l. ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan produksi oleh OPEC dan Rusia, penggunaan energi alternatif dan peningkatan produksi *shale oil*



Risiko tahun 2019:



Preferensi Konsumsi

Tren preferensi konsumsi masyarakat yang lebih memilih tabungan dan perubahan pola konsumsi, namun tidak tersalurkan kembali ke sektor riil.



Pemilu

Terdapat potensi menahan investasi langsung, menunggu dari hasil pemilu.



Normalisasi Kebijakan Moneter

Normalisasi kebijakan moneter tidak hanya di AS dan Eropa, dapat mempengaruhi kinerja investasi di sektor keuangan. Kebijakan perpajakan AS yang juga berisiko terhadap aliran dana pada negara berkembang, termasuk Indonesia.



Kebijakan Perdagangan

Kebijakan proteksionisme perdagangan AS, perlu diwaspadai dampaknya pada kinerja ekspor. Selain itu, perlu diwaspadai perkembangan perang dagang AS dengan Tiongkok

Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, perlu dilakukan:

- Kebijakan fiskal yang mendorong **investasi dan daya saing serta ekspor** dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas.
 - Insentif fiskal untuk peningkatan investasi
 - Belanja negara yang ekspansif dan mengarah kepada sektor yang produktif dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur
 - Mendorong pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk meningkatkan peran swasta membangun infrastruktur
 - Bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat miskin
 - Sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong konsumsi
- Menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan kebijakan pemerintah;
- Penciptaan situasi ekonomi dan politik yang terjaga dan kondusif dalam menjaga kepastian usaha dan investasi;
- Kelanjutan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi
- Menjaga inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat
- Penguatan ekspor yang berbasis non komoditas (migas) yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan perluasan pasar baru di negara-negara yang prospektif seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur



KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH

Dibangun berdasarkan kondisi historis lima tahun terakhir dan melihat prospek ekonomi dan arah pengelolaan fiskal ke depan

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH



KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH

Fokus untuk kualitas belanja yang efektif dan produktif, pelebaran fiskal space dan menjaga keberlanjutan fiskal



Uraian (% PDB)	APBN 2018	KEM-PPKF 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
Pendapatan Negara dan Hibah	12,76	12,7 - 13,5	12,7 - 13,9	13,5 - 14,0	13,6 - 14,4
Tax Ratio*	11,6	11,4 - 11,9	11,4 - 12,5	11,6 - 13,0	11,8 - 13,6
Belanja Negara	14,95	14,2 - 15,4	14,3 - 15,6	15,0 - 15,7	15,1 - 16,0
Belanja Modal	1,4	1,5 - 1,7	1,8 - 2,3	2,2 - 2,7	2,3 - 3,0
Keseimbangan Primer	(0,59)	0,05 - (0,30)	0,05 - 0,01	0,10 - 0,01	0,10 - 0,05
Surplus/Defisit	(2,19)	(1,6) - (1,9)	(1,6) - (1,7)	(1,5) - (1,7)	(1,5) - (1,6)
Rasio utang	29,07	28,8 - 29,2	28,50 - 28,61	27,81 - 28,30	26,25 - 27,87

• Tax ratio termasuk penerimaan PNB P SDA Migas dan pertambangan umum.

Catatan: Angka telah memperhitungkan realisasi PDB 2017

- **Penguatan kualitas belanja** dengan mendorong **belanja yang efektif dan produktif** (belanja modal diharapkan meningkat hingga mencapai 2,3%-3,0% PDB pada 2022)
- **Pelebaran ruang fiskal melalui peningkatan *tax ratio*** (*tax ratio* 2022 dapat mencapai 11,8-13,6% PDB)
- **Efisiensi belanja nonprioritas**
- **Pembiayaan kreatif dan inovatif** (KPBU dan Non-KPBU)
- **Pengendalian defisit** (tahun 2022 → 1,6% –1,5% PDB)
- **Rasio utang terjaga** (tahun 2022→27,87%-26,25% PDB)
- **Keseimbangan primer mulai positif tahun 2020**



POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2019

- 1. Analisis Pelaksanaan APBN 2018**
- 2. Arah dan Strategi Makro Fiskal 2019**
 - A. Mobilisasi Pendapatan yang realistis**
 - B. Belanja yang efektif dan produktif**
 - C. Efisiensi dan Inovasi Pembiayaan**
- 3. Program Prioritas dan Isu Strategis**

PELAKSANAAN APBN 2018



Risiko deviasi asumsi makro: kenaikan ICP, pelemahan nilai tukar, penurunan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi

	APBN	
Growth	5,4	↓
Inflasi	3,5	
Kurs	13.400	↑
SPN 3 Bln	5,2	↓
ICP	48	↑
Lifting Minyak	800	↓
Lifting Gas	1.200	↓



Pendapatan Negara dan Hibah

- Penerimaan Perpajakan (akibat realisasi 2017 dan risiko global)
- PNBPN SDA meningkat (akibat kenaikan ICP, nilai tukar dan harga komoditas)



Belanja Negara

- Subsidi meningkat (akibat kenaikan ICP dan nilai tukar)
- Pembayaran bunga utang meningkat (akibat depresiasi nilai tukar Rupiah)
- Penyesuaian TKDD selaras perubahan penerimaan

■ Defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman

- **Potensi deviasi asumsi dasar ekonomi makro:** pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, dan harga minyak (ICP) serta *lifting* minyak dan gas
- Meskipun diperkirakan tumbuh tinggi, masih ada **risiko penerimaan perpajakan** lebih rendah dari APBN 2018. **PNBP SDA diperkirakan meningkat** seiring naiknya harga minyak (ICP) dan harga komoditas
- **Potensi kenaikan belanja Non K/L (Subsidi energi dan pembayaran bunga utang)** akibat kenaikan ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah, serta suku bunga SPN 3 bulan
- Proyeksi **belanja K/L masih berpotensi terjadi penghematan alamiah**

ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2019

Memantapkan *penyehatan fiskal* dan *mendorong investasi serta ekspor*



TEMA RKP 2019

Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas



TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2019

APBN untuk
mendorong
investasi dan
daya saing



FOKUS KEBIJAKAN FISKAL

1. Menjaga Kesehatan Fiskal

- a. Produktif
- b. Efisien
- c. Daya Tahan
- d. *Sustainable*

2. Kebijakan Fiskal Mendorong Iklim Investasi dan Ekspor

- a. Simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor
- b. Peningkatan kualitas layanan publik
- c. Pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor

STRATEGI MAKRO FISKAL 2019

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, outlook 2018 dan arah kebijakan fiskal jangka menengah



1

Outlook 2018

1. Berbasis kinerja perekonomian terkini dan APBN realisasi 2017;
2. Proyeksi Asumsi Makro 2018;
3. Analisis risiko APBN 2018.

2

Tahun 2019

1. Penguatan SDM;
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur;
3. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan.



STRATEGI 2019

EKSPANSIF TERARAH DAN TERUKUR

- 1 Defisit semakin menurun (1,9-1,6)% PDB;
- 2 *Primary balance* menuju positif (0,3)-0,05 % PDB;
- 3 *Debt Ratio* 28,8-29,2% PDB

A.

MOBILISASI PENDAPATAN YANG REALISTIS

- Menjaga peningkatan tren *Tax Ratio*;
- Insentif fiskal untuk mendorong **investasi dan ekspor**;
- Penguatan pengelolaan SDA dan aset;
- Penguatan pengelolaan aset;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

B.

STRATEGI BELANJA AGAR LEBIH EFEKTIF DAN PRODUKTIF

- **Penguatan SDM** untuk peningkatan *skill* dan produktivitas;
- Mendorong **investasi dan ekspor**;
- Efektivitas **program perlindungan sosial** untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan;
- Melanjutkan **Infrastruktur untuk daya saing** dan kapasitas produksi;
- Reformasi institusi untuk **birokrasi yang melayani dan efisien**;
- Penguatan **kualitas desentralisasi fiskal**

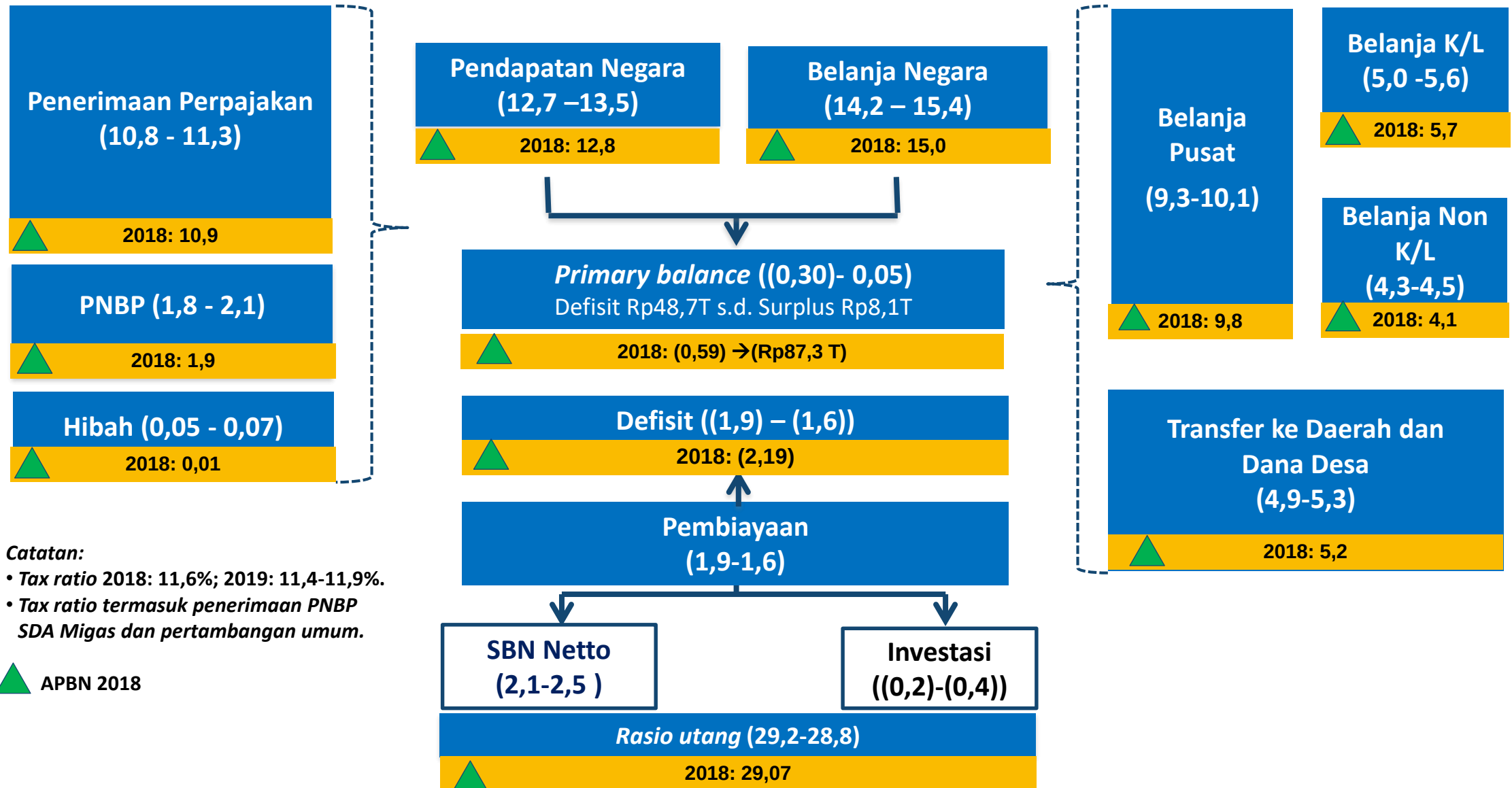
C.

PEMBIAYAAN YANG EFISIEN DAN KREATIF

- **Pembiayaan kreatif dan inovatif** melibatkan peran swasta;
- Defisit dan Rasio utang terkendali dan diupayakan menurun dalam jangka menengah;
- Keseimbangan primer menuju positif;
- Pembiayaan investasi untuk peningkatan **akses UMKM, peningkatan ekspor**

POSTUR MAKRO FISKAL 2019 (% PDB)

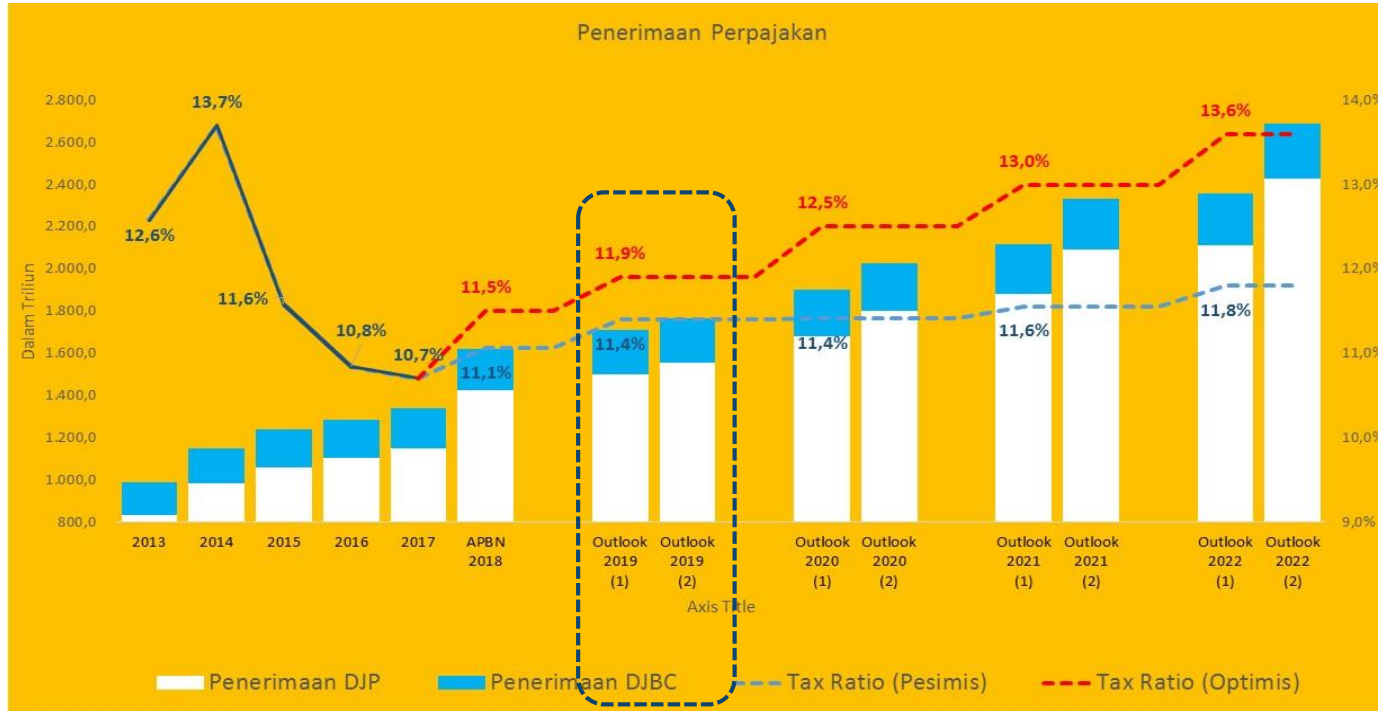
Mobilisasi pendapatan, belanja efektif dan produktif, serta inovasi pembiayaan





A. MOBILISASI PENDAPATAN YANG REALISTIS

PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN TAX RATIO 2013 - 2022



Tax Ratio → termasuk PNBP SDA (migas dan Pertambangan Umum).

ARAH UMUM KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2019

- 1) **Optimalisasi penerimaan perpajakan:** peningkatan kepatuhan, pengawasan dan penggalan potensi perpajakan dengan memanfaatkan data dan informasi - melalui pertukaran informasi dan *joint audit* DJP-DJBC, ekstensifikasi barang kena cukai dan *digital goods*, melanjutkan program Penertiban Impor, Ekspor dan Cukai Berisiko Tinggi (PIBT, PEBT, PCBT)
- 2) **Kebijakan perpajakan untuk daya saing dan meningkatkan investasi dan ekspor:** harmonisasi fasilitas pembebasan PPN untuk barang antara, fasilitasi industri dan perdagangan melalui Pusat Logistik Berikat Industri Kecil Menengah (IKM), dan pengembangan/perluasan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM.
- 3) **Transparansi informasi di bidang perpajakan :** implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan *Multilateral Instrument* (MLI), *Country by Country Reporting* (CbCR), dan *Authorized Economic Operator* (AEO) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)



ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2019

Optimalisasi penerimaan perpajakan

- peningkatan kepatuhan dan pengawasan,
- penggalan potensi melalui pertukaran informasi DJP-DJBC,
- penetapan tarif optimal PPN atas pengeluaran pemerintah agar tidak menambah beban restitusi,
- ekstensifikasi barang kena cukai dan *digital goods*,
- melanjutkan program Penertiban Impor, Ekspor, Cukai Berisiko Tinggi (PIBT, PEBT, PCBT)

Kebijakan perpajakan untuk daya saing dan meningkatkan investasi dan ekspor

- harmonisasi kebijakan PPN dengan pajak daerah
- harmonisasi PPN kawasan dengan dan non kawasan
- penurunan/efisiensi Biaya Logistik,
- perluasan pemasaran produk asal Kawasan Berikat (KB) di dalam negeri dan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- pembimbingan teknis dan asistensi kepada industri;
- harmonisasi fasilitas pembebasan PPN di barang antara
- pengembangan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Transparansi informasi di bidang perpajakan

- implementasi AEOI
- implementasi Persetujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan *Multilateral Instrument* (MLI),
- implementasi *Country by Country Reporting* (CBCR), AEO (*Autotized Economics Operator*) untuk UKM
- implementasi kegiatan Monitor Transaksi dan Perilaku Tidak Wajar

KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK

....untuk meningkatkan investasi yang telah kondusif dan mendorong ekspor



Desain Kebijakan Insentif Perpajakan

Insentif Perpajakan melalui Kawasan

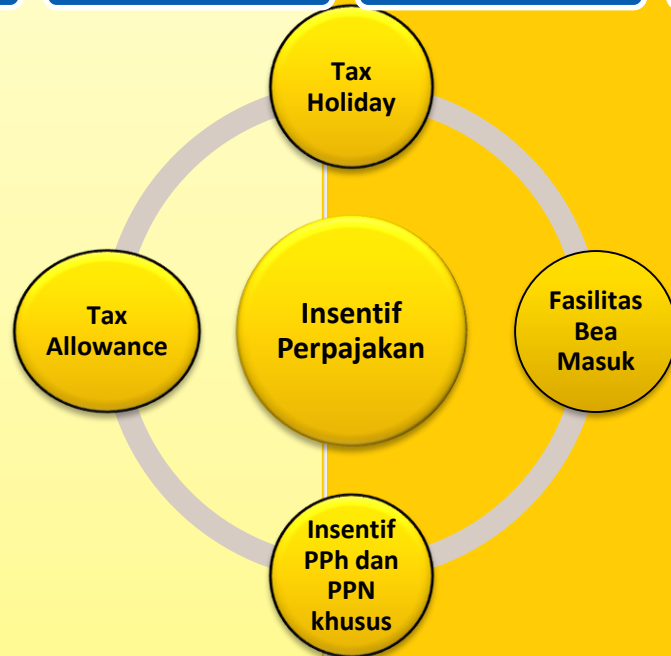
KEK

Kawasan Industri

Free Trade Zone

Tempat Penimbunan Berikat

Mendukung Investasi



Mendorong Ekspor

Insentif Khusus untuk Eksport

Kemudahan Import untuk Tujuan Eksport

Penugasan Ekpor

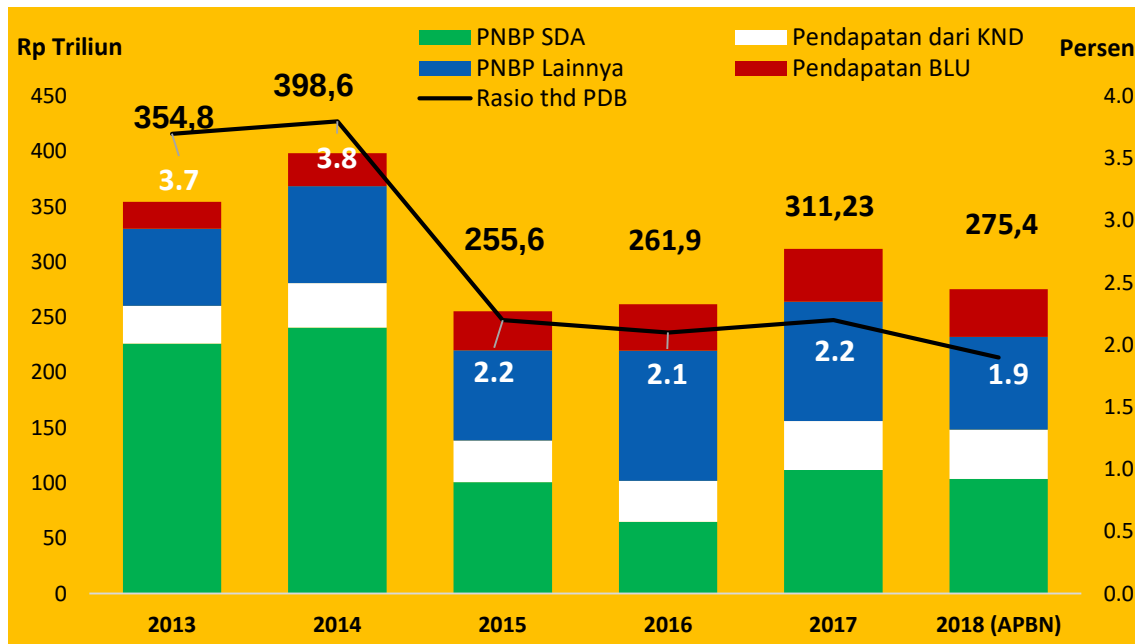
Tempat Penimbunan Berikat

Rencana Usulan Insentif Fiskal Baru



ARAH KEBIJAKAN PNBP 2019

Optimalisasi pendapatan, dengan tata kelola SDA, iklim usaha, dan pelayanan publik, serta adanya potensi meningkatnya harga komoditas



Catatan:

- PNBP 2018 dengan asumsi US\$48/bbl, realisasi 2017 sudah di angka US\$51,2/bbl
- KND = Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

Sumber: Kemenkeu

- Porsi PNBP SDA semakin mengecil, PNBP lainnya meningkat
- Realisasi PNBP 2017: Rp311,23 T (2,2% PDB), tumbuh 18,8%
- *Outlook* PNBP 2018 diperkirakan melebihi target terutama karena kenaikan harga minyak mentah dan batubara
- Target PNBP 2019 berkisar **1,8%-2,1% PDB**

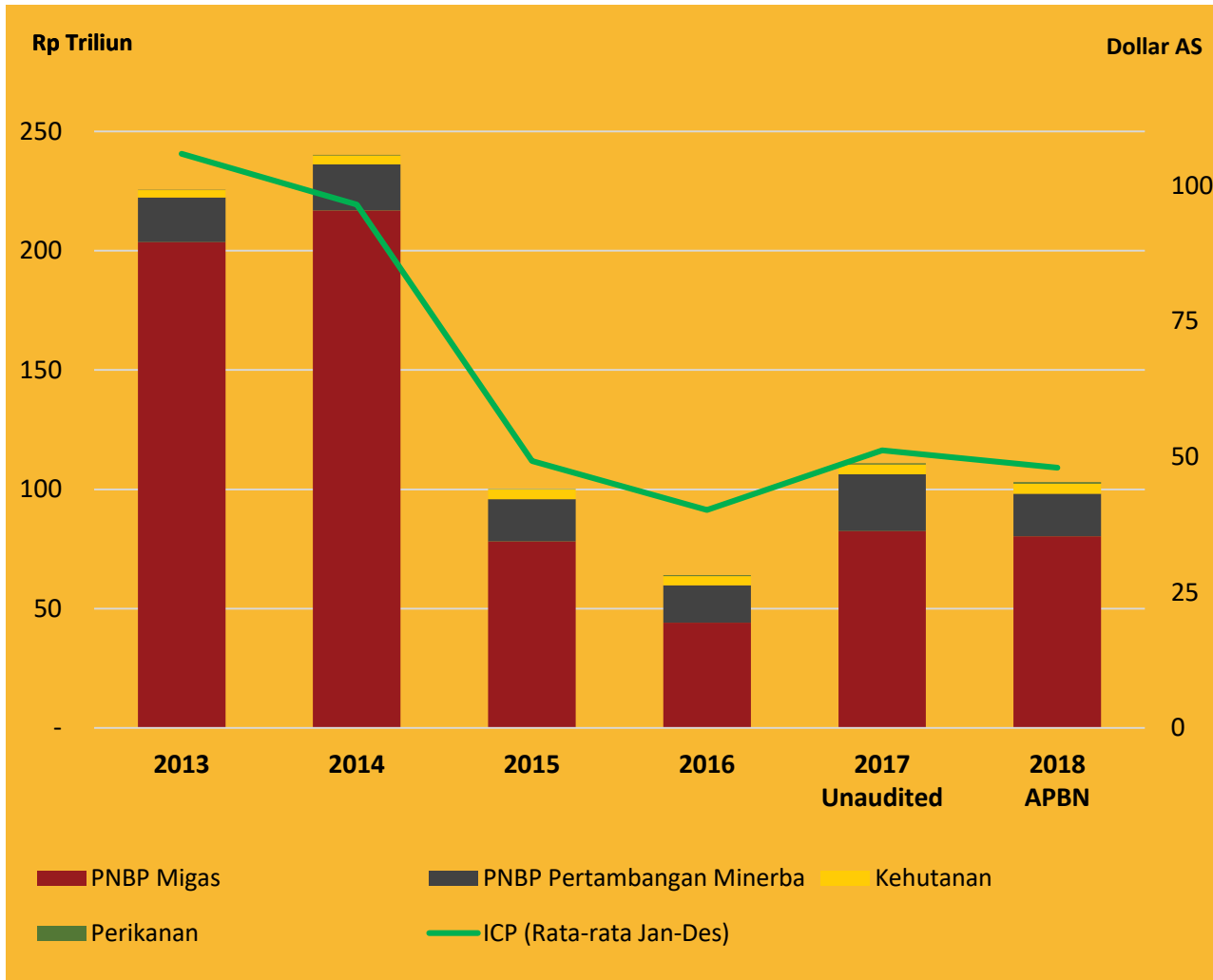
TANTANGAN 2019

- Ketidakpastian keberlanjutan kenaikan **harga komoditas** (migas dan batubara) mempengaruhi tingkat produksi
- Tuntutan kualitas pelayanan, terjaganya daya beli masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan

ARAH KEBIJAKAN PNBP TAHUN 2019

- Optimalisasi produksi hulu migas dan pertambangan mineral serta efisiensi biaya produksi
- Optimalisasi PNBP kehutanan, kelautan dan perikanan, serta panas bumi mempertimbangkan antara lain kelestarian lingkungan, keberlangsungan usaha, dan efisiensi produksi
- Peningkatan dividen BUMN mempertimbangkan kemampuan keuangan BUMN dalam pengembangan usaha dan penugasan Pemerintah
- Peningkatan pelayanan dan penyempurnaan tata kelola PNBP K/L serta penyesuaian tarif-nya dengan mempertimbangkan daya beli dan keberlangsungan dunia usaha
- Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

PNBP SDA MERUPAKAN KOMPONEN UTAMA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Sumber: Kemenkeu

- PNBP Migas merupakan komponen utama PNBP yang kontribusinya terhadap total PNBP terus menurun (sekitar 57% di 2013 → 17% di 2016 → 27% di 2017). Hal ini seiring perkembangan harga ICP.
- Penerimaan **PNBP SDA Migas** 2017 tumbuh 85,6% dibandingkan 2016, utamanya dipicu peningkatan harga minyak (ICP) menjadi rata-rata US\$51,2/barel.
- **PNBP SDA Pertambangan** tumbuh 50,8% pada tahun 2017, terutama akibat peningkatan harga batubara menjadi rata-rata US\$85,9/ton dan kepatuhan wajib bayar sebagai hasil perbaikan administrasi.
- **PNBP SDA Kehutanan** tumbuh 9,1% di tahun 2017 yang menunjukkan semakin banyak unit usaha pemanfaatan hutan dalam peningkatan produksi hutan (kayu bulat) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- **PNBP SDA Perikanan** tumbuh 35,3% di 2017 yang antara lain didukung peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), penegakan *Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing*, dan perbaikan administrasi seperti penertiban perizinan, layanan *online*.
- **PNBP SDA Panas Bumi** tumbuh sekitar 0,1% didorong relatif terjaganya produksi dan efisiensi biaya sehingga meningkatkan setoran bagian pemerintah.



B. BELANJA YANG EFEKTIF DAN PRODUKTIF

ARAH KEBIJAKAN BELANJA NEGARA 2019

*Penguatan value
for money:*

- *efisien*
- *efektif*
- *mendorong peran swasta*
- *sinergi antar K/L dan pusat-daerah*

1



SDM yang berkualitas

Mendorong **produktivitas dan daya saing** (pendidikan, kesehatan, vokasional, R&D serta lptek)

2



Dukungan fiskal untuk investasi dan ekspor serta sektor unggulan

Mendorong **keunggulan komparatif dan kompetitif** (pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri).

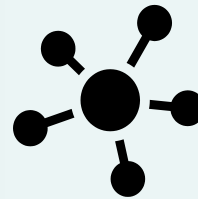
3



Efektifitas Bansos, Subsidi & TKDD

- Melindungi daya beli kelompok miskin dengan tetap memberikan subsidi
- Meningkatkan besaran bantuan PKH dengan perbaikan program
- Sinergi subsidi dan bansos
- Dana Desa 10% dari TKD dan peningkatan kualitas

4



Akselerasi Infrastruktur

- Menjaga anggaran infrastruktur dengan meningkatkan kualitas
- Mengembangkan skema **pembiayaan kreatif (KPBU dan Non-KPBU)**

5



Birokrasi yang efisien dan efektif

Mendorong **produktivitas, integritas, dan pelayanan publik** (gaji ke-13, THR, reformasi skema pensiun)

6



Antisipasi ketidakpastian

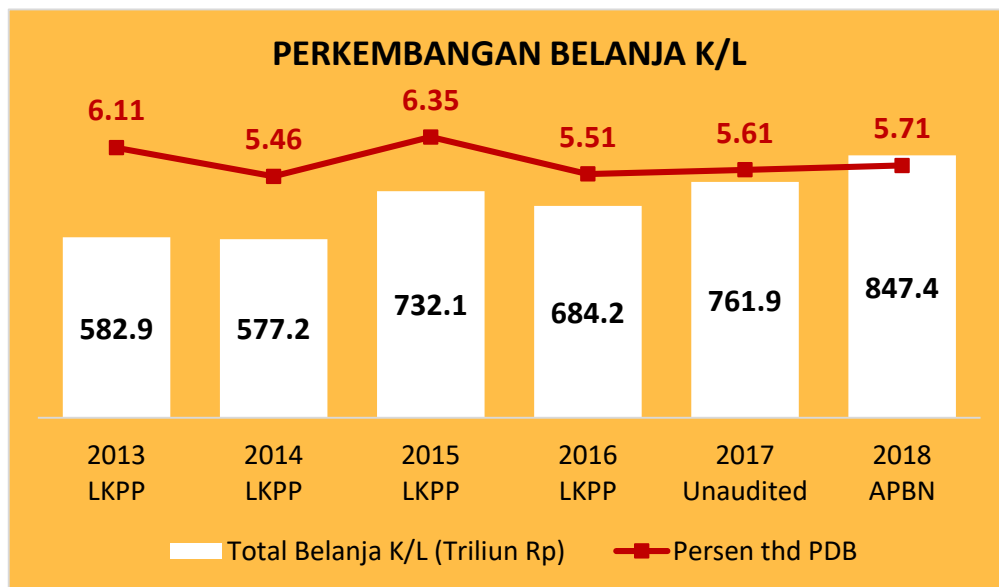
Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik

PENGUATAN KUALITAS BELANJA K/L (*Value for Money*)

Melalui efisiensi, efektivitas, sinergi, dan inovasi pembiayaan



PERKEMBANGAN BELANJA K/L



EVALUASI BELANJA K/L TAHUN 2013-2017

1. Belanja barang tumbuh tinggi 15,9%, sedangkan belanja modal masih relatif rendah (1,4% PDB), sehingga perlu ditingkatkan melalui efisiensi belanja barang.
2. Kualitas perencanaan dan penganggaran belum optimal:
 - Frekuensi Revisi DIPA 2017 masih tinggi (52.422 kali)
 - Masih terjadi inefisiensi belanja 2017: Rp7,35 T karena duplikasi anggaran, alokasi belanja berlebih (perjalanan dinas, honor, barang non-operasional, listrik), dan *einmalig*
 - Penyerapan masih rendah (rerata 93%) dan terakumulasi di Q4

ARAH KEBIJAKAN BELANJA K/L 2019

1. Mendorong pelaksanaan anggaran yang berbasis hasil (*result based*)
2. Efisiensi belanja barang:
 - Penghematan belanja barang non operasional (honor, bahan dan ATK), perjalanan dinas, konsinyering, & paket *meeting*
 - Penajaman dan sinkronisasi belanja barang ke pemda untuk mencegah duplikasi
3. Penguatan & rekomposisi belanja modal 1,5-1,7% PDB untuk peningkatan kapasitas produksi dan ekspor, pembatasan pengadaan kendaraan dinas & gedung kantor baru
4. Mendorong K/L mengembangkan pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran swasta
5. Meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial antara lain melalui peningkatan besaran bantuan PKH dengan perbaikan program, sinergi antar program, antar K/L al. PKH dengan BPNT, *pilot project* sinergi PKH, PIP, dan Bidikmisi (*sustainable education*)

Belanja K/L (Triliun Rp)	Rata2 2013-2017					2018				
	2013 LKPP	2014 LKPP	2015 LKPP	2016 LKPP	2017 Un-audited	Growth (%)	% thd PDB	Tr Rp	Growth (%)	% thd PDB
Bel. Pegawai	140,2	155,4	186,5	205,7	209,9	10,6	1,6	227,5	8,4	1,5
Bel. Barang	169,7	176,6	233,1	259,5	291,1	16,0	1,9	338,8	16,4	2,3
Bel. Modal	180,9	147,3	215,4	169,5	205,6	10,5	1,6	203,9	(0,8)	1,4
Bansos	92,1	97,9	97,2	49,6	55,3	(2,0)	0,7	77,3	39,7	0,5
Total Belanja K/L	582,9	577,2	732,1	684,2	761,9	10,0	5,8	847,4	11,2	5,7

MELANJUTKAN EFISIENSI BELANJA BARANG

Belanja barang perlu didorong semakin efisien



Belanja Barang (Triliun Rp)	2013 LKPP	2014 LKPP	2015 LKPP	2016 LKPP	2017 Un-audited	Rata2 2013-2017		Tr Rp	2018 APBN	
						Growth (%)	% thd PDB		y-o-y (%)	% thd PDB
Operasional	27,41	30,05	37,09	34,63	35,35	8,5	0,29	39,74	12,4	0,27
Non-Operasional	50,46	44,72	55,81	51,39	54,79	5,4	0,45	76,21	39,1	0,51
Persediaan	-	-	5,02	8,34	14,85	28,8	0,04	14,86	0,0	0,10
Jasa	21,11	21,78	26,28	26,81	29,60	11,1	0,22	34,44	16,3	0,23
Pemeliharaan	13,18	18,19	33,80	30,26	43,50	35,5	0,23	35,86	(17,6)	0,24
Perjalanan dalam Negeri	24,37	29,00	27,36	31,36	31,28	12,8	0,25	40,65	30,0	0,27
Perjalanan Luar Negeri	2,17	2,12	2,20	2,37	2,84	9,5	0,02	3,66	28,9	0,02
Belanja Barang BLU	16,67	18,94	19,37	34,72	36,58	21,5	0,21	38,27	4,6	0,26
Belanja barang untuk diserahkan	12,57	10,28	26,17	39,56	42,32	50,1	0,22	55,13	30,3	0,37
Total Belanja Barang	169,7	176,6	233,1	259,6	291,3	16,2	1,94	340,1	16,8	2,29
<i>Persen thd PDB</i>	<i>1,78</i>	<i>1,67</i>	<i>2,02</i>	<i>2,09</i>	<i>2,14</i>					

KONDISI TERKINI

Kebijakan *flat policy* mulai 2016 belum optimal:

- **Belanja barang** dalam 5 tahun terakhir masih tumbuh tinggi rata-rata per tahun 16,2%.
- **Pertumbuhan tahun 2018** masih lebih tinggi dari rata-rata (**16,8%**), terutama belanja **barang non operasional** (tumbuh 39,1%), **perjalanan dinas dalam negeri** (tumbuh 30,0%) dan **belanja barang untuk diserahkan Pemda/ masyarakat** (tumbuh 30,3%)

KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA BARANG 2019

1. **Flat policy** belanja operasional
2. Penghematan belanja barang non operasional (**honor, bahan, dan ATK**), **perjalanan dinas, konsinyering, paket meeting**
3. **Penajaman dan sinkronisasi belanja barang yang diserahkan masyarakat/Pemda** baik antar K/L maupun dengan Pemda;
4. Mengakomodasi **implementasi skema KPBU**

KUALITAS BELANJA MODAL YANG LEBIH PRODUKTIF

Penguatan belanja agar lebih produktif dan multiplier-nya kuat terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan



Belanja Modal (Triliun Rp)	2013 LKPP	2014 LKPP	2015 LKPP	2016 LKPP	2017 Un-audited	Rata-rata 2013-2017		Tr Rp	2018 APBN	
						% Growth	% thd PDB		y-o-y (%)	% thd PDB
Tanah	4,6	3,5	9,1	4,6	3,4	17,6	0,04	2,5	(27,2)	0,02
Peralatan dan Mesin	68,3	53,4	70,1	68,2	86,9	18,3	0,59	74,3	(14,6)	0,50
Gedung dan Bangunan	23,1	19,2	29,8	25,3	27,8	10,2	0,21	26,8	(3,7)	0,18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,8	65,6	98,6	64,0	80,1	6,5	0,67	92,6	15,6	0,62
Belanja Modal BLU	2,1	2,2	2,3	3,5	3,9	14,8	0,02	3,5	(10,9)	0,02
Modal Lainnya	3,8	3,4	5,6	4,0	3,4	0,9	0,04	4,2	22,8	0,03
Total Belanja Modal	180,9	147,3	215,4	169,5	205,6	10,5	1,61	203,9	(0,8)	1,37
<i>Persen thd PDB</i>	<i>1,89</i>	<i>1,39</i>	<i>1,87</i>	<i>1,37</i>	<i>1,51</i>					

- Belanja modal cenderung menurun (rata-rata 2013-2017 **1,61% PDB**), tahun 2018 sebesar **1,37% PDB**
- Daya saing dan kinerja logistik belum optimal karena pemanfaatan dan pengalokasian belanja modal yang relatif terbatas
- Daya saing 2017-2018 membaik (**dari peringkat 41 ke 36**), konsistensi penguatan infrastruktur akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS BELANJA MODAL 2019

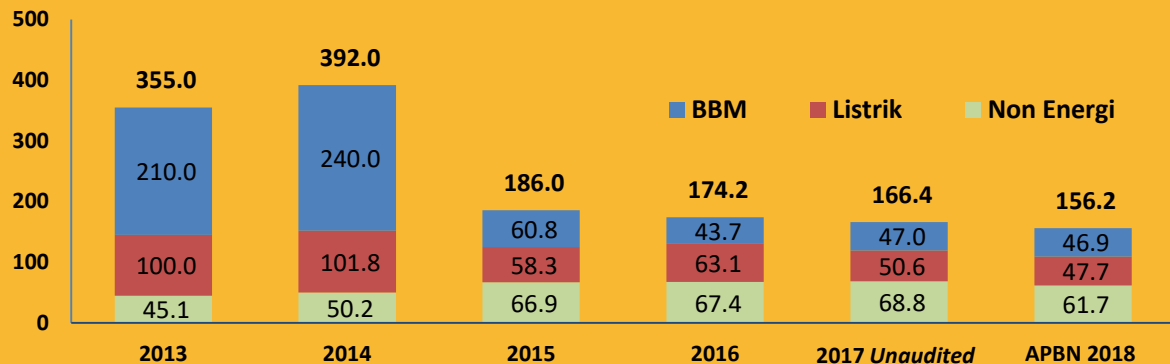
1. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan belanja modal **1,5-1,7% PDB**
2. Mendorong K/L terkait infrastruktur **memfokuskan pada percepatan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, konektivitas serta mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif**
3. Penguatan kualitas belanja modal dilakukan dengan:
 - pembatasan pengadaan **kendaraan bermotor dan pembangunan gedung baru**
 - diarahkan untuk belanja produktif untuk konektivitas, efisiensi sistem logistik dan peningkatan kapasitas produksi al. **pelabuhan, bandara, jalan, bendungan, irigasi dan energi serta waduk**

ARAH KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI 2019

Subsidi lebih tepat sasaran melalui perbaikan akurasi data dan perubahan paradigma dari subsidi komoditas ke subsidi langsung



PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI (Rp Triliun)



Dampak Kenaikan ICP terhadap Keuangan BUMN dan APBN Tahun 2018

Asumsi Makro

Harga ICP ↑



Gap melebar
Keekonomian vs
Harga Penetapan

Penanggung Risiko

Pertamina dan PLN

APBN

Masyarakat

Bauran:
Pertamina/PLN, APBN
dan Masyarakat

Dampak Kebijakan

▪ Beban Keuangan Pertamina dan PLN – Kontribusi ke APBN menurun

▪ Beban subsidi energi dalam APBN meningkat

▪ Apabila Harga BBM meningkat – potensi risiko inflasi, PDB, kemiskinan, dan sosial

▪ Pembagian risiko: perlu formulasi yang tepat agar dampak optimal bagi keuangan Pertamina dan PLN, APBN dan masyarakat (makro dan sosial)

KONDISI TERKINI

- Subsidi LPG tabung 3 kg masih terbuka
- Subsidi Listrik a.l untuk seluruh pelanggan RT dengan daya 450 VA dan RT miskin/rentan daya dengan 900 VA
- Harga BBM (premium dan solar) tidak pernah mengalami penyesuaian sejak April 2016
- Belum ada *adjustment* TTL non subsidi sejak 2017

TANTANGAN 2019

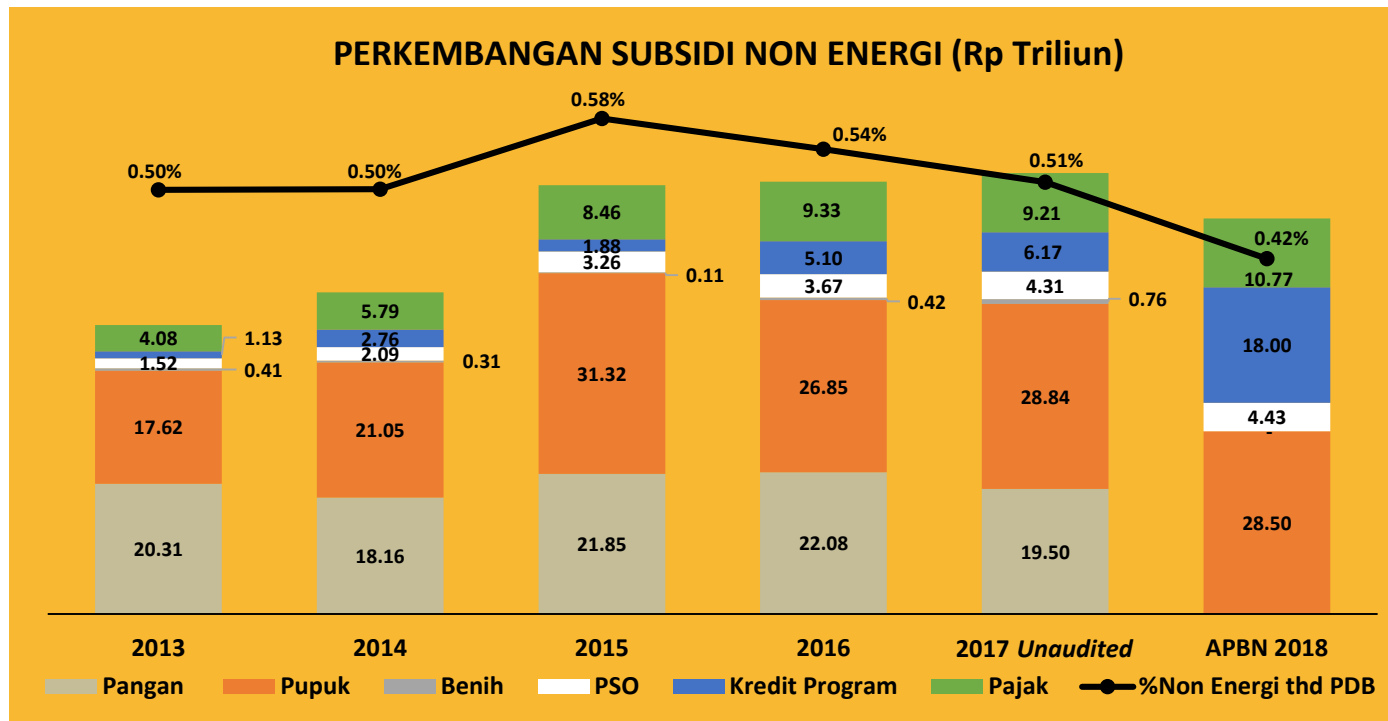
1. Validitas data penerima subsidi
2. Faktor eksternal pergerakan ICP, kurs, dan inflasi

KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI 2019

1. Pemberian subsidi terbatas untuk jenis BBM jenis solar (subsidi tetap) dan subsidi (selisih harga) untuk BBM jenis minyak tanah.
2. Pemberian subsidi LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran.
3. Pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga (RT) mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin:
 - Melanjutkan pemberian subsidi listrik pelanggan RT 900 VA untuk masyarakat miskin dan rentan;
 - Meningkatkan efisiensi subsidi listrik pelanggan RT 450 VA;
 - Memungkinkan pemberian subsidi secara langsung.
4. Meningkatkan pemakaian energi terbarukan dalam energi input tenaga listrik.

ARAH KEBIJAKAN SUBSIDI NON ENERGI 2019

Subsidi terus diupayakan agar lebih tepat sasaran dan efektif



KONDISI TERKINI

- Subsidi non energi terus turun dalam persentase terhadap PDB
- Subsidi pangan (Rastra) diubah menjadi bantuan pangan non tunai/BPNT
- Mayoritas subsidi non energi masih berupa subsidi pupuk, namun masih belum efektif dalam meningkatkan produktifitas pertanian
- Subsidi kredit program meningkat sejak 2016
- Sejak 2018, subsidi benih telah dialihkan menjadi bantuan langsung benih unggul

TANTANGAN 2019

1. Validitas data penerima subsidi
2. Pengawasan di tingkat pelaksanaan belum optimal

KEBIJAKAN SUBSIDI NON ENERGI 2019

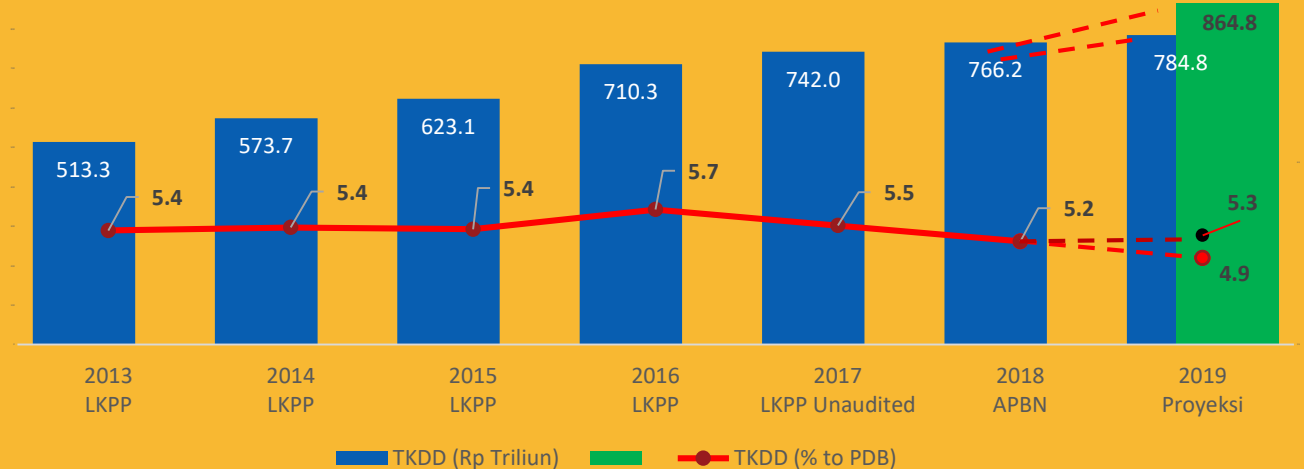
1. Perbaikan mekanisme penyaluran Subsidi Langsung Pupuk (SLP) melalui kartu tani untuk mendorong produktivitas serta peningkatan pengawasan penyaluran SLP
2. Perbaikan layanan umum bidang komunikasi dan transportasi kelas ekonomi
3. Pemberian subsidi LRT Jabodebek dalam rangka percepatan penyelenggaraan KA Ringan
4. Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan Petani melalui penurunan suku bunga KUR menjadi 7%, pemberian akses pembiayaan perumahan bagi MBR, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.
5. Pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (PPh DTP) untuk panas bumi dan SBN

PENGUATAN KUALITAS PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)



Meningkatkan kinerja pemda dalam penyediaan layanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat

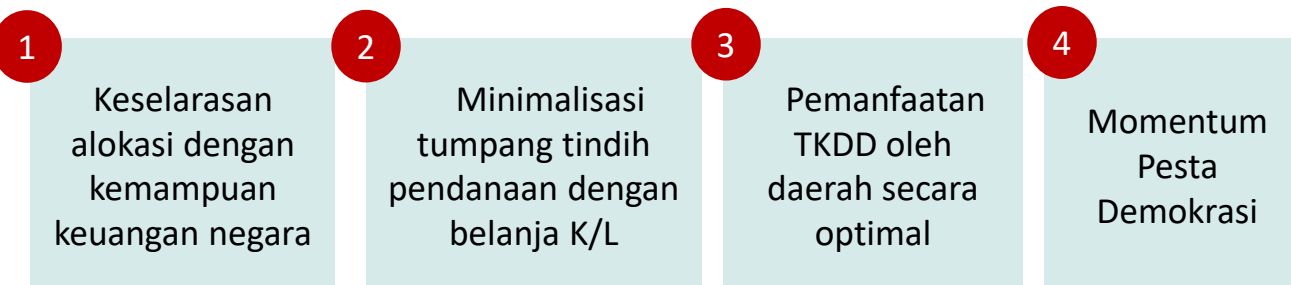
PERKEMBANGAN TKDD 2013 – 2018 DAN PROYEKSI 2019



EVALUASI TKDD PERIODE 2013-2018

- Alokasi meningkat → pertumbuhan rerata per tahun 8,3%.
- TKDD relatif terhadap PDB turun namun jumlahnya meningkat → 2013 = 5,4% PDB (Rp513,3 T); 2018 = 5,2% PDB (Rp766,2 T).
- TKDD mendanai lebih dari 70% total belanja APBD → strategi meningkatkan kinerja pemda dalam penyediaan dan pemerataan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

TANTANGAN PENGELOLAAN TKDD



ARAH KEBIJAKAN TKDD 2019

1. **Alokasi proporsional** sesuai kemampuan keuangan negara **dan sinkronisasi program** kegiatan DTK dan Dana Desa dengan program K/L.
2. **Dana Transfer Umum (DTU)**
 - Pengelolaan DBH transparan, akuntabel, dan berkeadilan
 - Penguatan fokus pemanfaatan DBH earmark → **DBH DR** mendukung pengendalian perubahan iklim & penanggulangan kebakaran hutan; **DBH CHT** mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional
 - Alokasi DAU sesuai kemampuan keuangan negara
 - DTU untuk infrastruktur daerah (minimal 25%) dan pemenuhan anggaran *mandatory* di daerah
3. **Dana Transfer Khusus (DTK)**
 - Peningkatan **kualitas SDM dan daya saing** → pendidikan, pengentasan *stunting*, infrastruktur daerah, dll
 - **Sinkronisasi** perencanaan DAK dan belanja K/L
 - Peningkatan **akurasi data** dan **biaya satuan** DAK Non Fisik
 - Penyaluran DTK **berbasis kinerja output/outcome**
4. **Penajaman kriteria penilaian DID** yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah termasuk upaya mendorong kemudahan berusaha di daerah
5. **Efisiensi dan efektivitas** penggunaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D. I. Yogyakarta (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan)
6. **Dana Desa**
 - Dana Desa dalam APBN hingga 10% dari dan diluar Transfer Ke Daerah
 - Pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, serta pengurangan kesenjangan layanan publik antardesa
 - Prioritas pembangunan dan penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi desa → kesejahteraan masyarakat desa



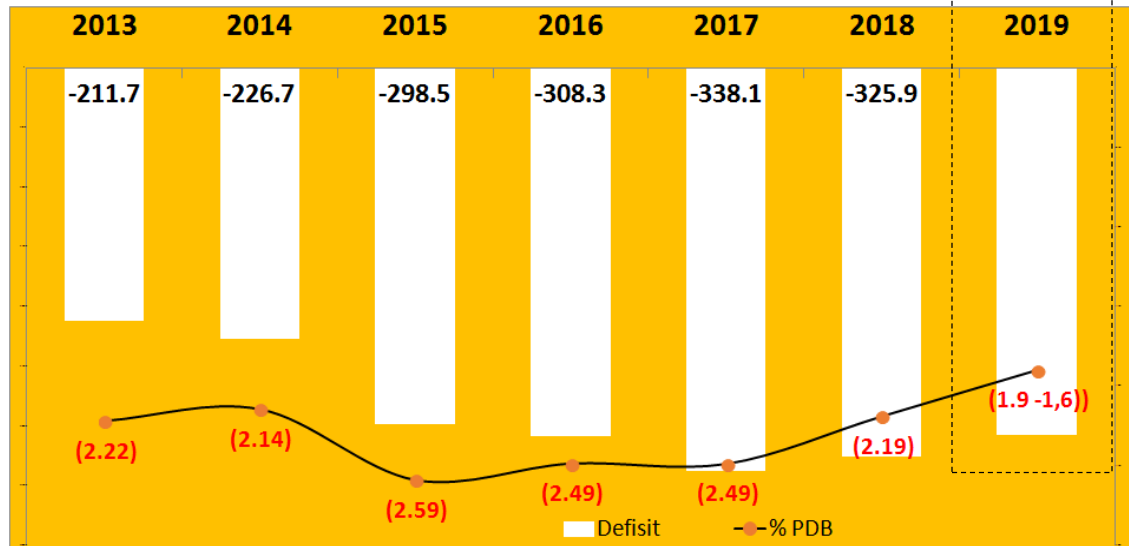
C. EFISIENSI DAN INOVASI PEMBIAYAAN

KEBIJAKAN EKSPANSIF YANG TERARAH DAN TERUKUR

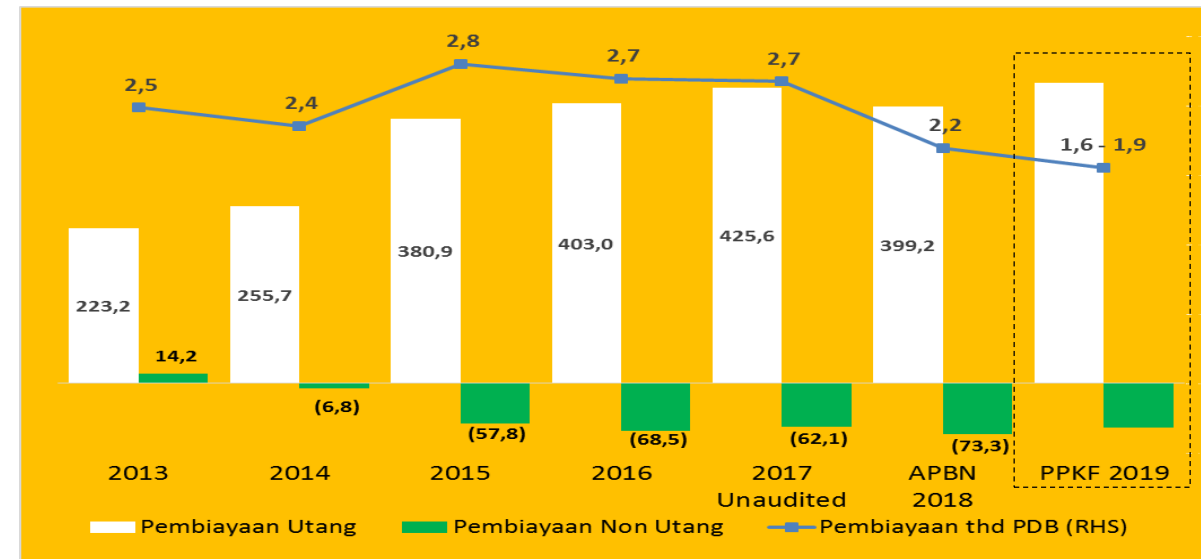
Counter Cyclical untuk menstimulasi perekonomian dengan defisit 1,6-1,9% PDB



DEFISIT TERKENDALI DALAM BATAS AMAN (% PDB)



PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN



1 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INVESTASI

- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur a.l melalui pembiayaan kreatif, penjaminan, dan pembiayaan investasi
- Meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan: penguatan peran LPDP sebagai SWF dengan perluasan program layanan (peningkatan beasiswa afirmasi dan vokasional) serta penguatan manajemen investasi
- Penguatan pembiayaan investasi kepada BUMN, BLU, badan lainnya serta LKI
- Peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang lebih tepat sasaran, layak huni, dan harga terjangkau, melalui sinkronisasi dan integrasi skema pembiayaan
- Mendorong peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account* (NIA)

2 ARAH KEBIJAKAN UTANG

- **Kehati-hatian** → menjaga rasio utang dalam batas yang aman (28,8 - 29,2% PDB)
- **Efisiensi Biaya Utang** → untuk efisiensi biaya utang dan menjaga kesinambungan fiskal ke depan
- **Produktivitas** → untuk belanja produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan al. dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur
- **Keseimbangan** → untuk menjaga komposisi utang DN dan LN dalam batas aman dan terkendali

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

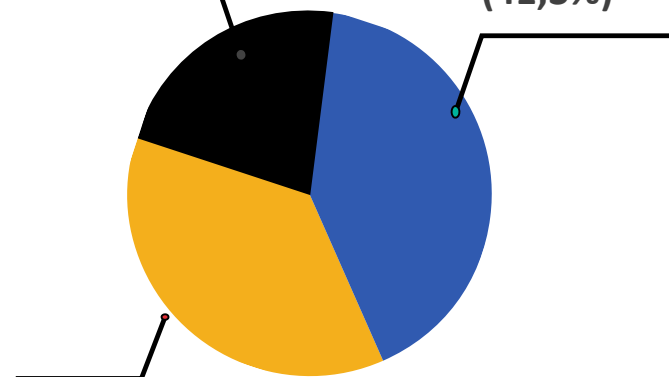
Terobosan pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, BUMD dan Pemda untuk akselerasi pembangunan infrastruktur



**TOTAL KEBUTUHAN Rp4.796,2 T
(2015 -2019)**

BUMN
Target alokasi
Rp1.066,2 Triliun
(22,2%)

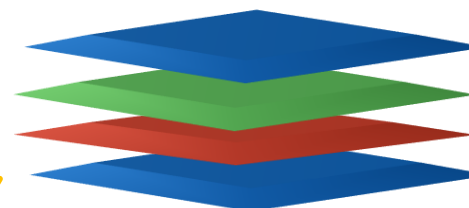
SWASTA
Target alokasi
Rp1.751,5 Triliun
(36,5%)



APBN DAN APBD

Target alokasi
Rp1.978,6 Triliun
(41,3%)

**TOTAL ALOKASI
Rp1.415,3 T**



2018: Rp410,4 T
2017: Rp401,1 T
2016: Rp313,5 T
2015: Rp290,3 T

Financing gap: perlu inovasi pembiayaan

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Viability Gap Fund (VGF) | 6. Sekuritisasi aset BUMN |
| 2. Project Development Fund (PDF) | 7. Green Bond |
| 3. Availability Payment (AP) | 8. Green Sukuk |
| 4. Penjaminan | 9. Direct lending |
| 5. Penanaman Modal Negara (PMN) | 10. Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) |

TANTANGAN PELAKSANAAN

- Mekanisme proses perizinan, tender, dan pembebasan lahan membutuhkan waktu cukup lama.
- Keterbatasan kapasitas pembiayaan karena mayoritas masih harus menggunakan dukungan APBN.
- Beberapa skema pembiayaan masih berpaku pada sektor infrastruktur.

ARAH KEBIJAKAN 2019

1. Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif, berdaya guna, dan berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan opsi-opsi kerjasama KPBU maupun non-KPBU sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN.
3. Mendorong pengembangan pembiayaan di luar bidang infrastruktur seperti pembiayaan Usaha Ultra Mikro/UMKM, asuransi, penyediaan fasilitas pendidikan maupun kesehatan dan air bersih.

PROGRAM PRIORITAS DAN ISU STRATEGIS

Akselerasi pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan



PENGUATAN SDMI

(pendidikan, kesehatan, R & D dan Vokasional)



AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

(proyek strategis nasional)



AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

(Efektifitas program perlindungan sosial dan subsidi)



ISU STRATEGIS

1. *stunting*
2. kesetaraan gender
3. manajemen bencana (*disaster management*)
4. mitigasi perubahan iklim

3

PRIORITAS

.... yang perlu penguatan

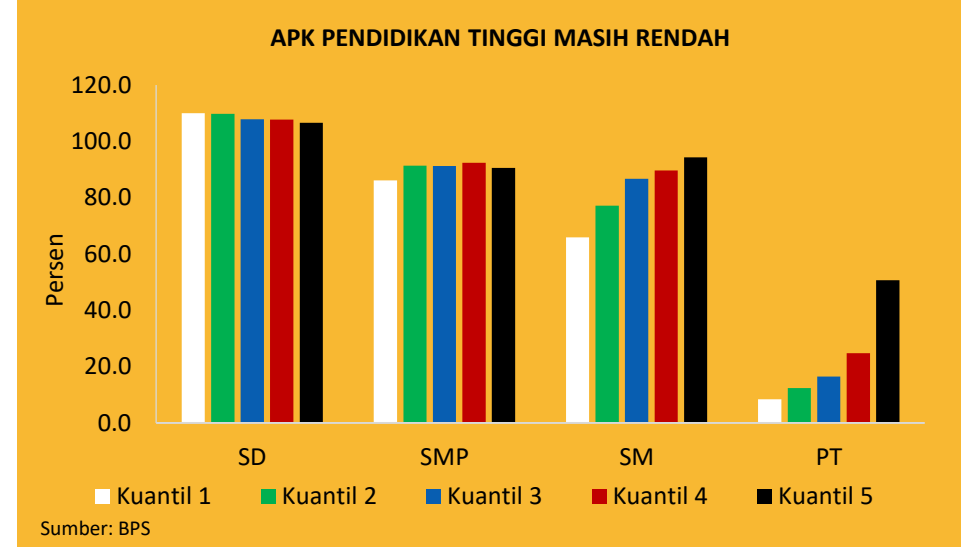
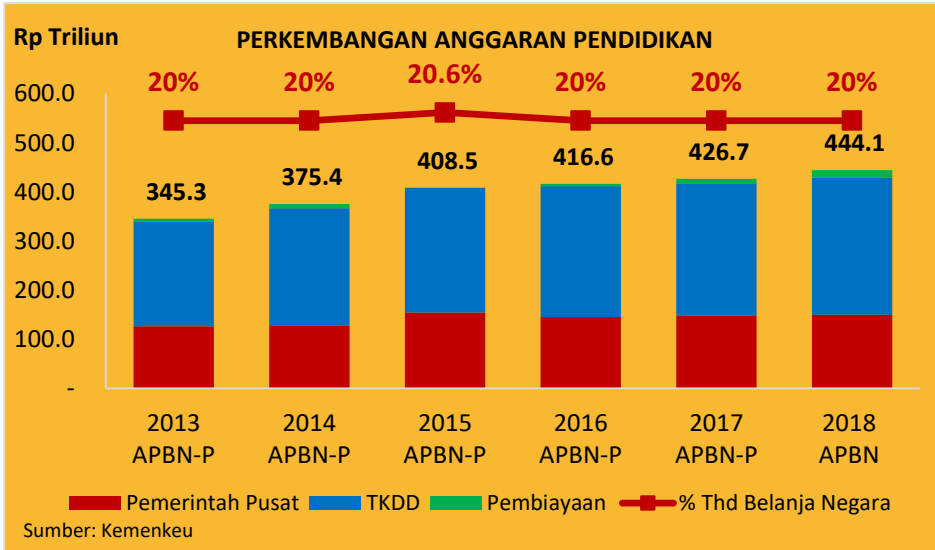
4

ISU STRATEGIS

.... yang perlu perhatian

PENGUATAN PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING SDM

Pemanfaatan anggaran pendidikan difokuskan untuk peningkatan kualitas dan akses serta vokasional serta penguatan LPDP sebagai SWF



**RATA-RATA LAMA SEKOLAH
PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS**

Target RPJMN
2019 : 8,8 tahun



Sumber: BPS

TANTANGAN

1. Akses pendidikan yang belum merata, khususnya pada **pendidikan menengah dan perguruan tinggi**
2. Ketersediaan **sarana dan prasarana yang belum memadai**, khususnya di Indonesia Timur & daerah 3 T
3. Penguatan **pendidikan kejuruan dan vokasi serta link and match**
4. Peningkatan **kualitas serta pemerataan distribusi guru** yang perlu lebih dioptimalkan
5. **Sinergi antar Program serta antar Pusat dan Daerah** perlu terus ditingkatkan
6. **Penguatan LPDP sebagai SWF Pendidikan** untuk menjamin keberlanjutan pendidikan antargenerasi

ARAH KEBIJAKAN 2019

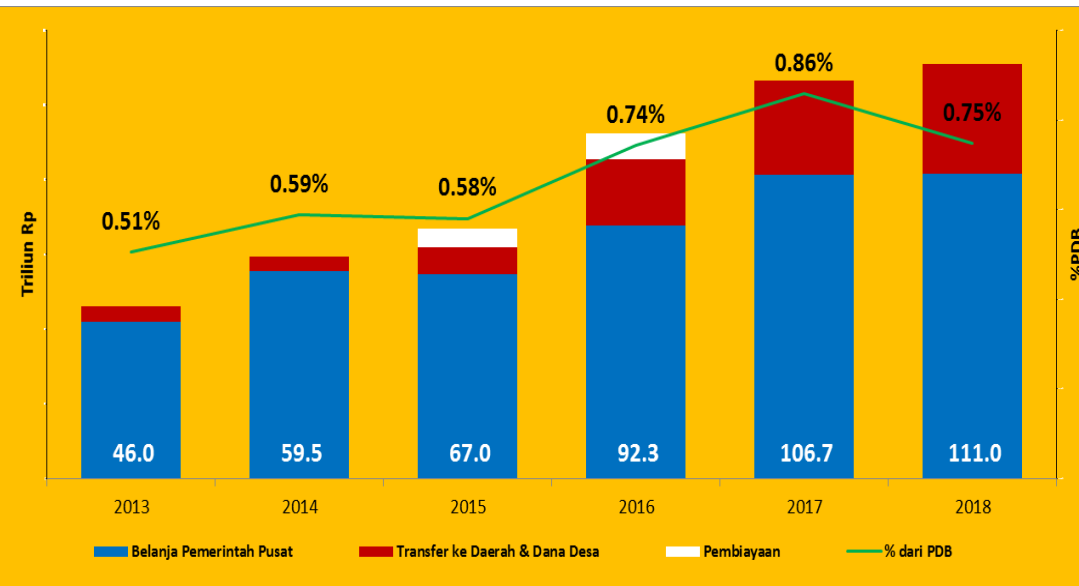
1. Melanjutkan Program Wajib Belajar 12 tahun untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan a.l. melalui penerapan BOP Kesetaraan,
2. Meningkatkan ketersediaan sarpras pendidikan yang layak melalui review besaran BOS dan BOP PAUD a.l. dengan mempertimbangkan indeks kemahalan, spesialisasi dan prestasi sekolah,
3. Meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan a.l. melalui review besaran bantuan PIP & Bidik Misi,
4. Memperkuat pendidikan vokasi khususnya melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri (*link and match*),
5. Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama dalam peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan,
6. Meningkatkan kompetensi dan pemerataan distribusi guru
7. Memperkuat peran LPDP sebagai SWF untuk mendorong perluasan program beasiswa afirmasi dan pengembangan beasiswa yang bersifat khusus (vokasi, ASN, TNI/Polri), dan
8. Mendorong sinergi antar program di bidang pendidikan untuk mewujudkan *sustainable education*.

PENGUATAN KUALITAS KESEHATAN UNTUK MENDORONG PRODUKTIVITAS SDM

Penguatan program promotive preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan JKN



PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN



TANTANGAN

1. Anggaran kesehatan meningkat tetapi belum optimal dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat **Kesenjangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan** antar wilayah
2. Kesenjangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan antar wilayah, yang tercermin dari menurunnya rasio ketersediaan dokter dan distribusi fasilitas kesehatan yang belum merata
3. Penguatan untuk penanganan *stunting*, imunisasi, promotif dan preventif
4. Perlu mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN
5. **Sinergi antar-program serta antar Pusat dan Daerah** perlu terus ditingkatkan

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2019	
ANGKA KEMATIAN IBU (per 100.000 kelahiran)	346	305	NA	NA	306	↑
PREVALENSI <i>STUNTING</i> ANAK BADUTA (%)	32,9	305	30.5	29,6	28	↓
PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI (%)	25,8	25,0	24,6	24,2	23,4	↓
KEPESERTAAN SJSN KESEHATAN (%)	51,8	60	68	71,27	<95	↑
KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS	75,5	77	80	83	90	↑

ARAH KEBIJAKAN 2019

Penguatan anggaran untuk program promotif dan preventif

- Mendorong **pola hidup sehat** melalui Germas
- **Percepatan penurunan *stunting*** melalui skema P4R
- **Peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita** dan imunisasi

Pemerataan akses ke layanan kesehatan

- **DAK Fisik** untuk pembangunan faskes
- **Mendorong KPBU** untuk pembangunan RS utamanya di daerah

Peningkatan efektivitas program JKN

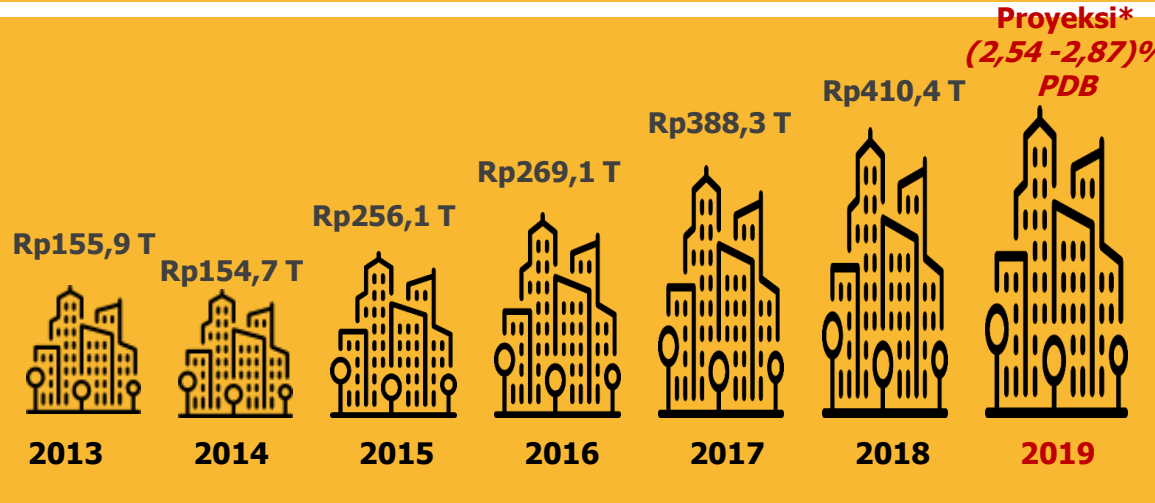
- **Percepatan peningkatan kepesertaan**, utamanya sektor informal
- Peningkatan **akses dan kualitas layanan kesehatan** program JKN
- Penguatan **pengawasan RS, klinik dan puskesmas** oleh Pemda untuk memastikan kualitas layanan kesehatan
- **Mitigasi *fraud***, dan efisiensi biaya operasional
- Mendorong ***supply side*** dengan sinkronisasi dengan Pemda

AKSELERASI INFRASTRUKTUR: PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI DAN DAYA SAING



Mendorong produktivitas, mobilitas, aksesabilitas, serta efisiensi biaya logistik

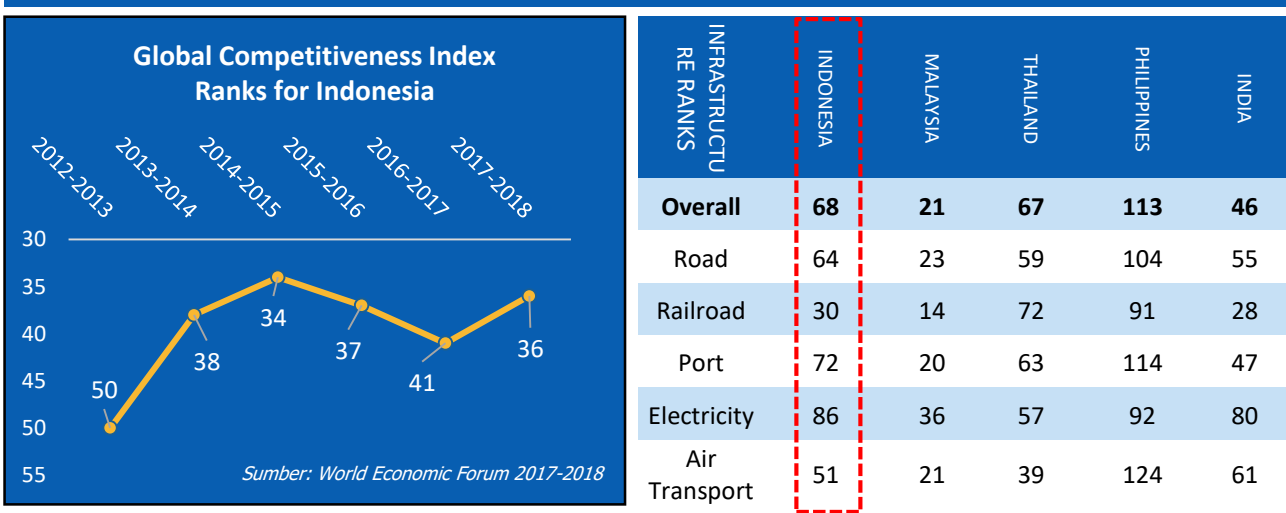
ANGGARAN INFRASTRUKTUR



TANTANGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

- PEMBIAYAAN** (*financing gap* yang cukup besar di tengah keterbatasan fiskal, sehingga perlu pemberdayaan swasta, BUMN, Pemda, dll)
- KOORDINASI** (koordinasi lintas sektoral dan penyelarasan pembangunan belum optimal terlaksana)
- ADMINISTRASI** (pembebasan lahan, perijinan, regulasi, dll)
- KEBERLANJUTAN** (pemeliharaan, penyediaan subsidi, dan pemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat)

DAYA SAING MENINGKAT NAMUN KUALITAS INFRASTRUKTUR MASIH TERTINGGAL



ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2019

- Peningkatan efektivitas alokasi anggaran infrastruktur** dan memperbaiki eksekusi proyek infrastruktur
- Memberdayakan swasta, BUMN, BUMD, dan Pemda** melalui pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk menutup *financing gap*
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral** termasuk dengan Pemda agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional
- Memperbaiki perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi** untuk mengatasi hambatan teknis
- Mendorong komitmen pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur** terutama pada K/L terkait infrastruktur

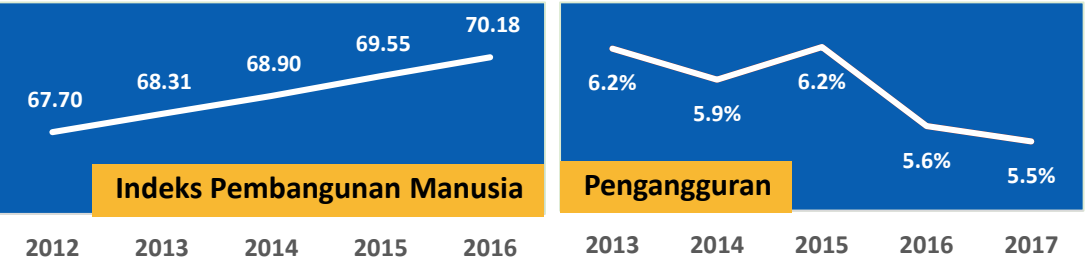
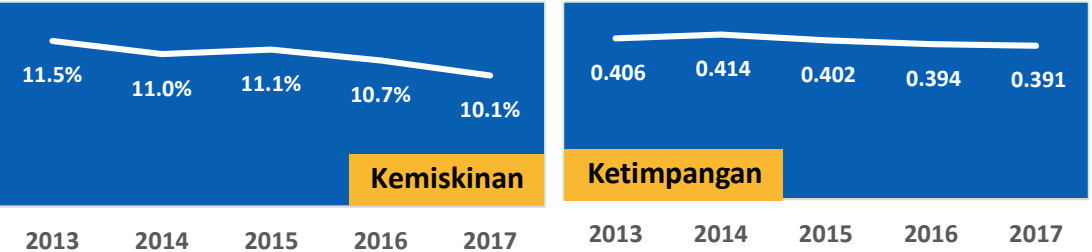
AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN

Mendorong efektivitas program: akurasi data, penyederhanaan mekanisme, sinergi antarprogram dan Pusat-Daerah



PERKEMBANGAN BANSOS & SUBSIDI (TRILIUN RP)						
	2013	2014	2015	2016	2017 Unaudited	2018 APBN
Bantuan Sosial						
PKH	3,4	4,4	6,4	9,1	12,8	17,1
PIP	12,1	6,7	11,7	11,0	10,0	10,8
PBI JKN	-	19,9	19,9	24,8	25,5	25,5
Bidik Misi	1,6	2,2	2,8	3,2	3,4	4,1
Bantuan Pangan	-	-	-	-	1,5	20,8
Subsidi						
Subsidi BBM & LPG 3 Kg	210,0	240,0	60,8	43,7	47,1	46,9
Listrik	100,0	101,8	58,3	63,1	50,6	47,7
Rastra	20,3	18,2	21,8	22,1	19,5	-
KUR	0,8	2,3	1,5	4,2	3,6	13,7
Dana Desa	-	-	20,8	46,7	59,8	60,0
Total	348,2	395,6	203,9	227,8	233,7	253,8

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MEMBAIK NAMUN MELAMBAT



KESEJAHTERAAN MEMBAIK NAMUN MELAMBAT

- Indikasi kemiskinan kronis diikuti peningkatan ketimpangan

BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI PROGRAM

- Akurasi data
- Mekanisme penyaluran lebih tepat sasaran, efektif dan inklusif
- Sinergi antarprogram
- Pemberdayaan sosial untuk peningkatan kemandirian

TANTANGAN

AKSES YANG TERBATAS DAN BELUM MERATA

- Layanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur
- Keterampilan, pekerjaan, modal

SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

- Penetapan target sasaran
- Sinergi antar K/L, Pemerintah Pusat dan Daerah
- Optimalisasi DAU, DTK, dan Dana Desa
- Peningkatan kualitas belanja APBD untuk pengentasan kemiskinan & kesenjangan

ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2019

Meningkatkan akses ke layanan dasar

- Pendidikan dan Kesehatan**
 - Pemerataan *supply side* antar daerah
 - Peningkatan efektifitas program perlindungan sosial
- Infrastruktur dan Perumahan**
 - Peningkatan dan pemerataan *supply side* infrastruktur
 - Program pembiayaan perumahan

Meningkatkan akses ke pekerjaan melalui perbaikan kualitas SDM

- Mendorong pendidikan vokasional Penyediaan sarpras pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
- Link & match system pendidikan dengan dunia usaha
- Penguasaan teknologi dari dalam & luar negeri

Meningkatkan akses ke permodalan

- Peningkatan akses untuk pemberdayaan melalui KUR, LPDB KUMKM, pembiayaan Ultra Mikro

Penguatan fungsi pajak untuk redistribusi pendapatan

- Perluasan basis pajak
- Penerapan pajak progresif

Mengendalikan harga pokok

- Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran
- Perbaikan tata niaga bahan pokok dan efisiensi distribusi
- Subsidi tepat sasaran

ISU-ISU STRATEGIS YANG PERLU PERHATIAN SERIUS

Akselerasi pengurangan stunting, pemberdayaan perempuan, mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana



ARAH KEBIJAKAN 2019

1

STUNTING

Akselerasi pengurangan stunting untuk kualitas SDM



- Mendorong sinergi dan komitmen K/L terkait dan Pemda
- Penerapan skema **performance for result (P for R)** untuk koordinasi dan efektivitas
- **Peningkatan intervensi pada ibu hamil, menyusui dan balita**
- perbaikan **akses kesehatan dan sanitasi dasar**

2

KESETARAAN GENDER

Pemberdayaan perempuan untuk produktivitas



- **Uji coba childcare support** → peningkatan tenaga kerja wanita;
- Integrasi kegiatan & pendanaan GSC ke dana desa dan program K/L
- **Vocational IT training** bagi kaum perempuan
- **Paternity leave** bagi kaum laki-laki di perkotaan
- Menurunkan **mortalitas ibu dan anak** melalui program PKH

3

PERUBAHAN IKLIM

Mendorong efektifitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim



- **Penguatan pengembangan pembiayaan kreatif (green sukuk dan green bond)** dengan memanfaatkan *budget tagging*
- **Akselerasi pemanfaatan pembiayaan internasional** seperti *Green Climate Fund (GCF)*, *Global Environment Fund (GEF)*, *Adaptation Fund*
- **Penyelarasan dengan pembiayaan terkait Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)** dan dari sektor perbankan, serta swasta (filantropi dan CSR)

4

MANAJEMEN BENCANA

Mendorong skema pembiayaan dampak bencana yang lebih antisipatif



- Mengembangkan skema **pembiayaan yang fleksibel, efisien dan efektif serta inovatif untuk mitigasi risiko bencana** (al. asuransi bencana, *pooling fund*)
- **Keseimbangan pendekatan ex-post dan ex-ante**
- Penguatan dan **kemandirian industri asuransi bencana**

STUNTING

Akselerasi pengurangan stunting untuk peningkatan kualitas dan produktivitas SDM



STUNTING

Kondisi anak yang lebih pendek dari rerata tinggi badan normal anak-anak seusianya akibat kekurangan gizi (kondisi gagal tumbuh)



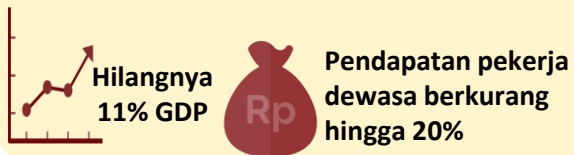
PENYEBAB

- Kurangnya akses rumah tangga miskin ke makanan bergizi
- Kurangnya akses air bersih & sanitasi
- Praktek pengasuhan yang kurang baik
- Terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan dan pembelajaran dini

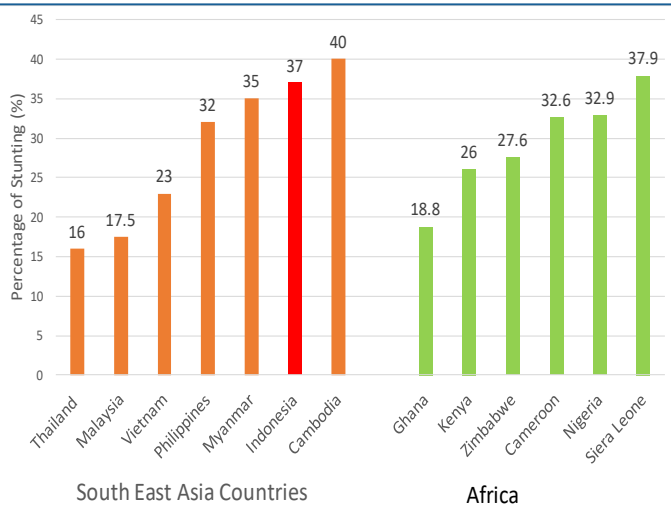
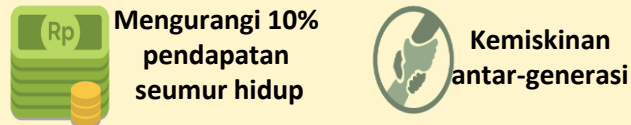


NILAI STRATEGIS STUNTING

MENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS PASAR KERJA



MEMPERBURUK KESENJANGAN/INEQUALITY



- Meskipun menurun, prevalensi *stunting* di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain.
- Tingkat *stunting* di Indonesia tertinggi ke dua di Asia Tenggara setelah Kamboja, bahkan lebih tinggi dari beberapa negara Afrika.

Sumber: Global Nutrition Report, 2015

TANTANGAN

1. Koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan → antar-K/L, antara Pemerintah dan pemda
2. Kualitas, cakupan, dan sasaran pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan
3. Belum meratanya akses kepada layanan kesehatan, pendidikan anak usia dini, air bersih, dan sanitasi
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi yang baik dan perubahan perilaku hidup sehat

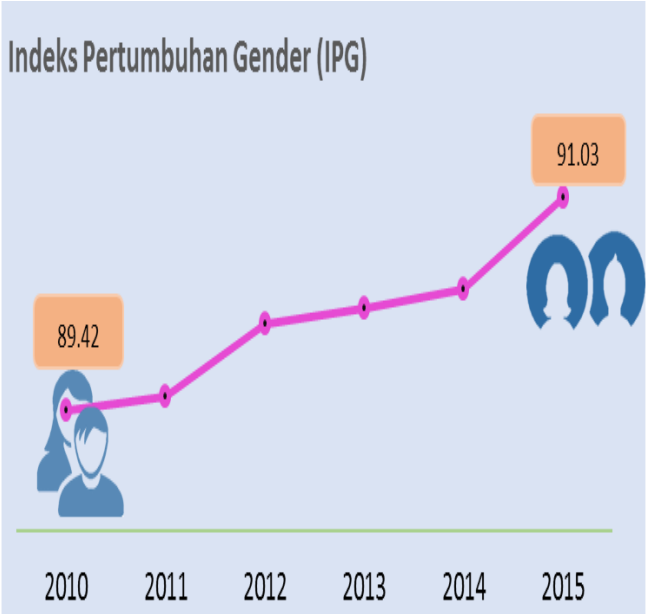
ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2019

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran program penurunan *stunting*
 - perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (**result based planning and budgeting**) dan pengembangan **budget tagging**
2. Memperkuat **konvergensi program/kegiatan** di tingkat kabupaten/kota hingga di level desa
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program (**delivery**)
 - peningkatan kualitas SDM pelaksana program
 - penguatan **monitoring & evaluasi** untuk mengukur capaian kinerja
4. Meningkatkan cakupan dan kualitas program perlindungan sosial yang berkontribusi terhadap penurunan *stunting* khususnya bantuan pangan, PKH, dan JKN.

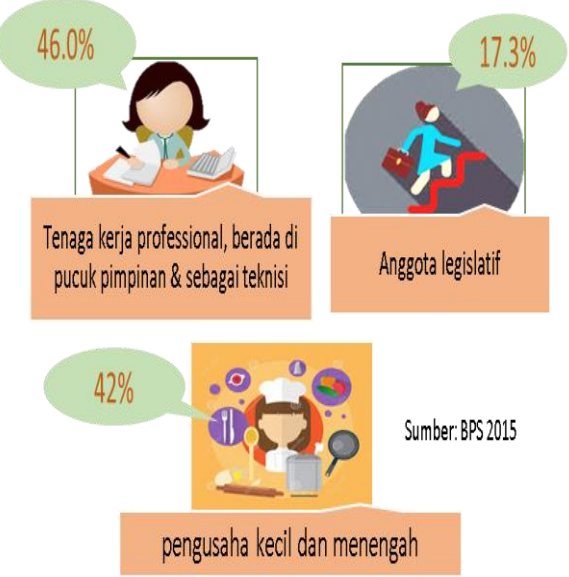


KESETARAAN GENDER

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang



Sumber: BPS 2015



- Perempuan memegang peranan penting dalam perekonomian dan berkontribusi baik, misalnya dalam kepatuhan membayar cicilan kredit perbankan.
- Partisipasi perempuan di bursa tenaga kerja sudah mulai meningkat, terutama sebagai profesional dan pengusaha.

- IPG adalah rasio IPM perempuan dan laki-laki, apabila nilainya mendekati 100 maka akan semakin kecil gap-nya
- IPG Indonesia membaik, 2010: 89,42 -> 2015: 91.03. Namun masih menempati posisi 88 dari 144 negara.

Program yang telah dilaksanakan 2013-2017

1. Melakukan upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui penyusunan anggaran yang responsive gender baik di pusat maupun daerah sejak tahun 2012
2. KUR: meningkatkan akses keuangan dan tenaga kerja terutama bagi kaum perempuan yang berasal dari kalangan MBR
3. PKH: mengurangi angka mortalitas ibu dan anak
4. Generasi Sehat Cerdas (GSC) → bidang kesehatan dan pendidikan di desa
5. Penyediaan *shelters* dan klinik trauma bagi korban pelecehan seksual dan *labor trafficking* (di bawah pengawasan Kemensos).

ARAH KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Uji coba dapat dilakukan di beberapa daerah untuk *childcare support*/subsidi PAUD guna mendukung peningkatan proporsi tenaga kerja wanita dalam angkatan kerja
2. Integrasi kegiatan dan pendanaan GSC dalam Dana Desa dengan program K/L yang lain
3. *Vocational IT training* bagi kaum perempuan
4. Menurunkan angka mortalitas ibu dan anak melalui program PKH.

TANTANGAN PELAKSANAAN

1. Sinergi program antar K/L dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah
2. Kecukupan ruang fiskal

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN RISIKO BENCANA

Isu-isu Utama dan Prioritas Kebijakan Pembiayaan Risiko Bencana



Risiko fiskal akibat bencana disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal dan pengelolaan yang belum terencana dan terintegrasi dengan pengelolaan risiko bencana.

- Pada bencana katastrofik, APBN memiliki keterbatasan untuk membiayai kegiatan kebencanaan (kurang dari 20% terhadap kerugian), fleksibilitas pengadaan barang/jasa.
- Pemerintah belum mempunyai kebijakan pembiayaan untuk mitigasi dan transfer risiko yang menyeluruh (*ex-ante*).
- Potensi penurunan penerimaan pajak akibat bencana.
- Di masa tidak terjadi bencana, dana kontijensi tidak termanfaatkan sementara pada saat terjadi bencana kekurangan dana.
- Besarnya kerugian materi, juga disebabkan kualitas infrastruktur yang belum ramah bencana.

Tujuan Kebijakan Pembiayaan Bencana:

Pembiayaan Bencana untuk pemenuhan pendanaan yang besar, cepat, terencana, tepat sasaran, berkelanjutan, yang dikelola secara lebih transparan untuk mengurangi kerugian ekonomi, beban APBN dan risiko fiskal

Prioritas Pemerintah:

- melindungi aset milik negara baik yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- melindungi infrastruktur publik
- melindungi seluruh rumah tangga dan masyarakat yang terkena dampak bencana, khususnya yang berpenghasilan rendah.
- memulihkan kehidupan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana.
- mendorong peran swasta dalam *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI) dan pengembangan pasar asuransi domestik (bencana)



2018-2019

Program/Instrumen

2018-2023

1. Perumusan Kebijakan Nasional Pembiayaan Risiko Bencana
2. DRFI sebagai isu strategis KEM-PPKF 2019
3. Penguatan skema pembiayaan *ex-ante* yang ada termasuk cakupannya (asuransi pertanian)
4. Pelaksanaan *Pilot Project* Asuransi BMN
5. Edukasi DRFI (Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Parlemen, K/L, Pemda)

1. *Pooling Fund* (Pengelola Dana, model seperti FONDEN, *Mexico's Natural Disaster Fund*):

- Untuk Pembiayaan *Ex-Ante* dan *Ex-Post* = > tanggap darurat, rehab rekon serta mitigasi dan transfer risiko (termasuk ke pasar internasional)
- Sumber dana: alokasi rutin APBN dan sisa dana kontijensi untuk menambah dana abadi dan dana pihak ketiga
- Komplementer APBN

2. Skema Pembiayaan Baru:

- Asuransi rumah penduduk, khususnya penduduk miskin
- Asuransi Infrastruktur

3. Pemahaman instrument internasional yang sesuai (*Catastrophe Deferred Drawdown Option/DDO* dan *Catastrophe Bond*)

4. Mendorong sharing Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembiayaan *ex-ante*
5. Mendorong peran swasta dalam pembiayaan risiko bencana

MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Penguatan dukungan fiskal untuk mitigasi perubahan iklim sesuai komitmen National Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi tanpa memberatkan fiskal



7 kota dan provinsi di Indonesia termasuk dalam kategori Top 10 daerah kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim; dimana Jakarta adalah wilayah yang paling rentan (SIDA, 2009)



TANTANGAN

- 1) **Ketersediaan dana signifikan, tetapi tidak mencukup untuk menurunkan target emisi Gas Rumah Kaca (GRK).** Kebutuhan lahan gambut, energi dan transportasi tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp100T – Rp140T per tahun
- 2) **Akses terhadap pendanaan internasional memerlukan kesiapan,** seperti akses *Green Climate Fund (GCF)*
- 3) **Koordinasi** antar K/L dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran

ARAH KEBIJAKAN FISKAL PRIORITAS PERUBAHAN IKLIM

- 1) **Penguatan kementerian dan lembaga dalam merumuskan perencanaan penganggaran** berdasarkan *performance based budgeting* dengan sasaran penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan
- 2) **Penguatan pembiayaan perubahan iklim melalui skema pembiayaan inovatif** seperti KPBU, BLU/BLUD, SBN/SBSN (*green bond* dan *green sukuk*)
- 3) **Penguatan dan penajaman skema transfer ke daerah** untuk mendukung pembiayaan perubahan iklim,
- 4) **Akselerasi/percepatan pemanfaatan pembiayaan internasional** seperti *Green Climate Fund (GCF)*, *Global Environment Fund (GEF)*, *Adaptation Fund*
- 5) **Penyelarasan dengan pembiayaan terkait Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)** dan dari sektor perbankan
- 6) **Penyelarasan dengan skema pembiayaan swasta lainnya** yang sudah diatur di dalam regulasi pemerintah seperti filantropi, *Corporate Social Responsibility (CSR)*



Terima Kasih